



KEBIJAKAN UMUM APBD PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016



PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2016

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 30 TAHUN 2016
NOMOR 842/-1.713

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Sumarsono, MDM.
NIP : 195902221985031001
Jabatan : Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi
Jakarta Pusat 10110

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : Prasetio Edi Marsudi, S.H.
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110
- b. Nama : H. Mohammad Taufik
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110
- c. Nama : Ir. H. Triwisaksana, M.Sc.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110
- d. Nama : H. Lulung AL., S.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110
- e. Nama : H. Ferrial Sofyan
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama DPRD Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2017.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi :

1. Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017.
2. Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2017.
3. Persetujuan perpanjangan waktu kegiatan tahun jamak dari periode 2013-2016 menjadi periode 2013-2017 dan pergeseran alokasi anggaran kegiatan Tahun Jamak Tahun 2016-2017.

4. Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 menggunakan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang lama, selanjutnya PIHAK PERTAMA akan melakukan penyesuaian terhadap Program dan Kegiatan berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
5. Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 didasarkan atas hasil pembahasan revisi rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun Anggaran 2017 yang dikirimkan kepada DPRD dengan surat Gubernur tanggal 20 Oktober 2016 Nomor 4614/-1.713 dan hasil pembahasannya dituangkan dalam Berita Acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.
6. PIHAK PERTAMA akan melakukan penginputan seluruh hasil pembahasan Banggar DPRD bersama TAPD ke dalam sistem e-budgeting segera setelah penandatanganan kesepakatan ini.

Secara lengkap, Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2017 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017.

Jakarta, 21 November 2016

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Selaku
PIHAK PERTAMA,



Dr. SUMARSONO, MDM.
NIP 195902221985031001

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Selaku
PIHAK KEDUA,



PRASETIO EDI MARSUDI, S.H.
Ketua



H. MOHAMMAD TAUFIK
Wakil Ketua



Ir. H. TRIWISAKSANA, M.Sc.
Wakil Ketua

H. LULUNG AL., S.H.
Wakil Ketua

H. FERRIAL SOFYAN
Wakil Ketua

RINGKASAN RAPBD PROVINSI DKI JAKARTA
HASIL PEMBAHASAN KUA-PPAS TAHUN ANGGARAN 2017
ANTARA BADAN ANGGARAN DPRD BERSAMA TAPD

NO	URAIAN	2016		2017		SELISIH
		APBD	RAPBD-P HASIL SIDANG PARIPURNA	REVISI RANCANGAN KUA-PPAS	HASIL PEMBAHASAN KUA-PPAS	
I	PENDAPATAN	59.004.784.464.142	57.161.248.465.732	60.369.636.291.554	60.899.636.291.554	530.000.000.000
A.	Pendapatan Asli Daerah	39.322.613.624.142	38.501.784.839.738	40.930.308.000.554	41.460.308.000.554	530.000.000.000
	• Pajak Daerah	32.010.000.000.000	33.100.000.000.000	34.700.000.000.000	35.230.000.000.000	530.000.000.000
	- PKB	7.050.000.000.000	7.050.000.000.000	7.900.000.000.000	7.900.000.000.000	0
	- BBN-KB	4.800.000.000.000	4.800.000.000.000	5.000.000.000.000	5.000.000.000.000	0
	- PBB-KB	1.300.000.000.000	1.050.000.000.000	1.100.000.000.000	1.100.000.000.000	0
	- Pajak Hotel	1.600.000.000.000	1.600.000.000.000	1.630.000.000.000	1.630.000.000.000	0
	- Pajak Restoran	2.550.000.000.000	2.600.000.000.000	2.800.000.000.000	2.800.000.000.000	0
	- Pajak Hiburan	700.000.000.000	700.000.000.000	750.000.000.000	750.000.000.000	0
	- Pajak Reklame	1.150.000.000.000	1.150.000.000.000	850.000.000.000	850.000.000.000	0
	- PPJ	760.000.000.000	775.000.000.000	850.000.000.000	900.000.000.000	50.000.000.000
	- Pajak Air Tanah	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	0
	- Pajak Parkir	500.000.000.000	500.000.000.000	520.000.000.000	600.000.000.000	80.000.000.000
	- BPHTB	4.600.000.000.000	5.150.000.000.000	5.300.000.000.000	5.300.000.000.000	0
	- PBB	6.400.000.000.000	7.100.000.000.000	7.300.000.000.000	7.700.000.000.000	400.000.000.000
	- Pajak Rokok	500.000.000.000	525.000.000.000	600.000.000.000	600.000.000.000	0
	• Retribusi Daerah	800.000.000.000	649.175.000.000	650.000.000.000	650.000.000.000	0
	- Retribusi Jasa Umum	300.350.000.000	100.000.000.000	103.793.400.000	103.793.400.000	0
	- Retribusi Jasa Usaha	100.000.000.000	149.525.000.000	136.621.600.000	136.621.600.000	0
	- Retribusi Jasa Perizinan Tertentu	399.650.000.000	399.650.000.000	409.585.000.000	409.585.000.000	0
	• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	790.000.000.000	324.739.130.552	453.338.246.000	453.338.246.000	0
	• Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.722.613.624.142	4.427.870.709.186	5.126.969.754.554	5.126.969.754.554	0
B.	Dana Perimbangan	13.867.897.878.000	15.990.368.025.994	18.664.926.691.000	18.664.926.691.000	0
	• Dana Bagi Hasil	13.867.897.878.000	12.345.909.779.994	15.020.468.445.000	15.020.468.445.000	0
	- Dana Bagi Hasil Pajak	13.819.992.249.000	12.302.767.116.994	14.977.325.782.000	14.977.325.782.000	0
	~ PBB*	120.501.770.000	100.041.325.000	100.041.325.000	100.041.325.000	0
	~ PPH	13.699.490.479.000	12.202.725.791.994	14.877.284.457.000	14.877.284.457.000	0
	- Bagi Hasil Bukan Pajak	47.905.629.000	43.142.663.000	43.142.663.000	43.142.663.000	0
	• Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0
	• Dana Alokasi Khusus	0	3.644.458.246.000	3.644.458.246.000	3.644.458.246.000	0
C.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.814.272.962.000	2.669.095.600.000	774.401.600.000	774.401.600.000	0
	• Pendapatan Hibah	2.244.419.882.000	2.669.095.600.000	774.401.600.000	774.401.600.000	0
	- Bantuan Dana (Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus)	0	0	0	0	0
	- Hibah untuk MRT	2.233.619.000.000	2.657.998.000.000	763.304.000.000	763.304.000.000	0
	- Hibah untuk Jasa Raharja	10.800.882.000	11.097.600.000	11.097.600.000	11.097.600.000	0
	• Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	3.569.853.080.000	0	0	0	0
	- Transfer utk Guru Sertifikasi & Non Sertifikasi	2.001.642.280.000	0	0	0	0
	- Dana BOS	1.568.210.800.000	0	0	0	0
II	BELANJA	59.945.522.786.232	57.365.040.315.366	62.019.133.393.596	63.479.133.393.596	1.460.000.000.000
A.	Belanja Tidak Langsung	25.562.945.425.753	26.360.740.772.649	28.191.330.507.554	28.124.890.813.036	-66.439.694.518
	• Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan DPRD, PNS, CPNS)	18.715.193.047.771	19.919.153.427.404	20.347.770.123.750	20.347.770.123.750	0
	- Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD	59.492.166.000	70.384.795.877	100.210.320.750	100.210.320.750	0
	- Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	676.800.000	676.800.000	676.800.000	676.800.000	0
	- Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	299.816.000	260.411.000	275.644.000	275.644.000	0
	- Gaji dan Tunjangan PNS dan CPNS	6.022.696.783.771	5.972.216.516.555	6.282.412.351.000	6.282.412.351.000	0
	- Asuransi Kesehatan (BPJS)	105.903.469.000	101.530.533.000	105.903.469.000	105.903.469.000	0
	- TKD PNS dan CPNS	9.360.818.371.000	10.872.529.867.972	11.047.924.349.000	11.047.924.349.000	0
	- Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	54.385.362.000	54.385.362.000	54.385.362.000	54.385.362.000	0
	- Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	652.000.000.000	485.488.087.000	351.444.613.000	351.444.613.000	0

NO	URAIAN	2016		2017		SELISIH
		APBD	RAPBD-P HASIL SIDANG PARIPURNA	REVISI RANCANGAN KUA-PPAS	HASIL PEMBAHASAN KUA-PPAS	
	- Biaya Kematian Pensiunan PNS	27.829.500.000	27.829.500.000	27.829.500.000	27.829.500.000	0
	- luran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	16.215.000.000	24.618.860.000	16.267.935.000	16.267.935.000	0
	- Tunjangan Penghargaan PNS	6.723.000.000	5.936.814.000	13.223.000.000	13.223.000.000	0
	- Tunjangan Transport Pejabat (Pengganti KDO Pejabat)	368.074.500.000	263.217.600.000	307.138.500.000	307.138.500.000	0
	- Biaya Guru NIP 15	38.436.000.000	38.436.000.000	38.436.000.000	38.436.000.000	0
	- Tambahan Penghasilan Guru PNS Non Sertifikasi	3.915.000.000	3.915.000.000	3.915.000.000	3.915.000.000	0
	- Tambahan Penghasilan Guru PNS Sertifikasi	1.997.727.280.000	1.997.727.280.000	1.997.727.280.000	1.997.727.280.000	0
	• Belanja Bunga	30.000.000.000	30.000.000.000	49.226.437.819	49.226.437.819	0
	• Belanja Subsidi	1.612.726.275.800	1.335.426.275.800	3.434.116.847.884	3.234.116.847.884	-200.000.000.000
	• Belanja Hibah	2.550.498.855.395	2.253.260.193.332	1.117.644.127.550	1.298.502.156.929	180.858.029.379
	• Belanja Bantuan Sosial	2.524.193.425.000	2.503.493.425.000	2.554.788.619.000	2.500.613.722.000	-54.174.897.000
	• Belanja Bantuan Keuangan	1.818.003.960	215.759.514.710	348.804.149.960	348.804.149.960	0
	• Belanja Tidak Terduga	128.515.817.827	103.647.936.403	338.980.201.591	345.857.374.694	6.877.173.103
B.	Belanja Langsung	34.382.577.360.479	31.004.299.542.717	33.827.802.886.042	35.354.242.580.560	1.526.439.694.518
	• Belanja Pegawai	1.575.091.993.662	1.565.336.831.943			0
	• Belanja Barang dan Jasa	16.624.523.868.403	16.812.815.404.875			0
	• Belanja Modal	16.182.961.498.414	12.626.147.305.899			0
	SURPLUS/(DEFISIT)	(940.738.322.090)	(203.791.849.634)	(1.649.497.102.042)	(2.579.497.102.042)	-930.000.000.000
						0
III	PEMBIAYAAN	940.738.322.090	203.791.849.634	1.649.497.102.042	2.579.497.102.042	930.000.000.000
A.	Penerimaan	8.163.357.322.090	5.748.789.849.634	8.389.776.000.000	9.389.776.000.000	1.000.000.000.000
	• SiLPA	7.933.425.813.490	4.933.519.451.750	4.700.000.000.000	5.700.000.000.000	1.000.000.000.000
	• Pinjaman JEDI	229.931.508.600	379.902.397.884	0	0	0
	• Pinjaman MRT : Pinjaman Daerah	0	0	3.689.776.000.000	3.689.776.000.000	0
	• Pengembalian Investasi Dana Bergulir	0	435.368.000.000	0	0	0
B.	Pengeluaran	7.222.619.000.000	5.544.998.000.000	6.740.278.897.958	6.810.278.897.958	70.000.000.000
	• Penyertaan Modal Pemerintah	7.222.619.000.000	5.544.998.000.000	6.723.080.000.000	6.793.080.000.000	70.000.000.000
	- PT. MRT Jakarta	2.282.619.000.000	2.806.998.000.000	4.673.080.000.000	4.673.080.000.000	0
	- PT. Jakarta Propertindo	2.950.000.000.000	1.000.000.000.000	1.200.000.000.000	1.200.000.000.000	0
	- PT. Jakarta Tourisindo	0	0	0	0	0
	- PD. PAL Jaya	370.000.000.000	140.000.000.000	230.000.000.000	0	-230.000.000.000
	- PT. Bank DKI	500.000.000.000	500.000.000.000	0	0	0
	- PD. Dharma Jaya	0	98.000.000.000	0	0	0
	- PT. Food Station Tjipinang	0	300.000.000.000	0	0	0
	- PT. Transportasi Jakarta	750.000.000.000	330.000.000.000	420.000.000.000	420.000.000.000	0
	- PT. Penjamin Kredit Daerah	0	200.000.000.000	0	0	0
	- PD. Pasar Jaya	370.000.000.000	170.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	0
	- PT. PAM Jaya	0	0	0	300.000.000.000	300.000.000.000
	- PD. Pembangunan Sarana Jaya			0	0	0
	• Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
	- PPMK LKM Bina Ekonomi	0	0	0	0	0
	• Pembayaran Utang Pokok	0	0	17.198.897.958	17.198.897.958	0
	TOTAL PENDAPATAN + PENERIMAAN PEMBIAYAAN (A)	67.168.141.786.232	62.910.038.315.366	68.759.412.291.554	70.289.412.291.554	
	TOTAL BELANJA + PENGELUARAN PEMBIAYAAN (B)	67.168.141.786.232	62.910.038.315.366	68.759.412.291.554	70.289.412.291.554	
	TOTAL A - B	0	0	0	0	
	TOTAL APBD	67.168.141.786.232	62.910.038.315.366	68.759.412.291.554	70.289.412.291.554	

Jakarta, November 2016

Pimpinan Banggar DPRD Prov DKI Jakarta

TAPD Provinsi DKI Jakarta

H. Ferrial Sofyan H. Mohamed Taufik Ir. H. Truwisaksana, M.Sc H. Lulung AL, SH

Plt. Inspektur

Kepala BPKAD

Kepala Bappeda

Sri Rahayu W.
NIP 196203081989122001

Heru Budi Hartono
NIP 196512131993031006

Tuty Kusumawati
NIP 196304291986032003

Prasetyo Edi Marsudi

Sekretaris Daerah

Saefullah
NIP 196402111984031002

HASIL PEMBAHASAN ANTARA BANGGAR DENGAN TAPD
TERHADAP KUA-PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

Hasil Pembahasan s.d. 16 November 2016 pkl. 11.00

NO	KOMISI	URAIAN	KEGIATAN	KELUAR POT	MASUK POT	KETERANGAN
		TOTAL		2.568.466.966.748	2.568.466.966.748	-
A		PENDAPATAN			530.000.000.000	530.000.000.000
1		Penambahan Pajak Daerah	Pajak PPJ tambah 50M, pajak parkir tambah 80M, PBB tambah 400M			
B		BELANJA		2.268.466.966.748	808.466.966.748	(1.460.000.000.000)
1		Belanja Tidak Langsung		197.735.202.482	264.174.897.000	66.439.694.518
		Dinas Pendidikan	Bantuan Sosial Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)		54.174.897.000	
		BPMPKB	Belanja Hibah PPMK	35.692.500.000		
		Dinas Olahraga dan Pemuda	Belanja Hibah KONI utk Pembinaan Olahraga Berprestasi Berkelanjutan	56.076.729.379		total KONI mjd Rp.82.752.179.529
		Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan	Belanja Subsidi pangan		200.000.000.000	total subsidi pangan mjd Rp.402.789.660.000
		Dinas Kesehatan	Belanja Hibah Komisi Penanggulangan AIDS		10.000.000.000	total AIDS mjd Rp.5.000.000.000
		Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Honor guru madrasah non PNS	51.000.000.000		
		Dinas Pendidikan	Belanja Hibah operasional PAUD	38.152.800.000		total PAUD mjd Rp.80.812.800.000
		Biro Dikmental	Belanja Hibah Dewan Masjid	6.500.000.000		total Dewan Masjid mjd Rp. 13.000.000.000
		Biro Dikmental	Belanja Hibah MUI	886.000.000		total MUI mjd Rp.5.886.000.000
		Biro Dikmental	Belanja Hibah NU	650.000.000		total NU mjd Rp.2.000.000.000
		Biro Dikmental	Belanja Hibah Muhammadiyah	1.150.000.000		total Muhammadiyah mjd Rp.2.000.000.000
		Bakesbangpol	LVRI	250.000.000		Total menjadi 500.000.000
		Bakesbangpol	Pepabri	500.000.000		Total menjadi 750.000.000
		BTT		6.877.173.103		
2		Belanja Langsung		2.070.731.764.266	544.292.069.748	(1.526.439.694.518)
3		PPBD	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional untuk Sekretariat DPRD	20.000.000.000		
3		PPBD	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	1.000.000.000		
3		KPKD Kepulauan Seribu	Sewa rumah bagi pegawai KPKD Kad.Adm.Kep.Seribu	79.200.000		
5		BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Penyediaan Sarana Prasarana untuk RPTRA	978.057.300		
5		BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Rehab Total Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Timur	62.442.775		
5		Dinas olah raga	Persiapan ASIAN Games 2018	1.500.000.000		
5		Dinas olah raga	TC Luar Negeri PON Remaja II/2017		90.241.214.480	
5		Dinas olah raga	Pengiriman Kontingen PON Remaja tahun 2017		9.969.997.100	
5		Dinas olah raga	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga untuk PON Remaja II/2017		4.923.807.779	
5		Dinas olah raga	Pengadaan Perlengkapan Kontingen PON Remaja II/2017		1.056.617.100	
5		Dinas olah raga	Rehabilitasi Gelanggang Remaja Kecamatan Pademangan	20.455.991.540		
5		Dinas olah raga	Rehabilitasi Gelanggang Remaja Kecamatan Cengkareng	21.115.991.540		
5		Dinas olah raga	Pemantauan dan Evaluasi Kontingen Olahraga dan Pemuda Tahun 2017 Provinsi DKI Jakarta		289.676.000	
5		DINAS PENDIDIKAN	Pengadaan Meubeler Sekolah	11.647.594.662		
5		DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Total Gedung Sekolah di DKI Jakarta		256.049.910	
5		DINAS PENDIDIKAN	Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TK Negeri	292.150.800		
5		DINAS SOSIAL	Penyediaan Alat Tulis Kantor	263.159.500		
5		DINAS SOSIAL	Penyediaan Makanan dan Minuman	1.078.086.000		

NO	KOMISI	URAIAN	KEGIATAN	KELUAR POT	MASUK POT	KETERANGAN
5	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - JAKPUS		Pengadaan dan Pengolahan Koleksi Perpustakaan Konvensional untuk Perpustakaan Kota, Perpustakaan Kelurahan dan Kecamatan, Taman Bacaan Masyarakat, dan RPTRA .	653.168.243		
5	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - JAKUT		Penyediaan Sarana dan Prasarana kebutuhan RPTRA dan Perpustakaan Rumah Susun		2.548.880.400	
5	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - JAKUT		Pengadaan dan Pengolahan Koleksi Perpustakaan Konvensional untuk Perpustakaan Kota, Perpustakaan Kelurahan dan Kecamatan, Taman Bacaan Masyarakat, dan RPTRA Pengadaan bahan pustaka kebutuhan RPTRA		2.054.085.064	
5	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - JAKUT		Rehab Ringan Gedung Perpustakaan Jl. Logistik	726.153.222		
5	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - JAKUT		Rehab ringan gedung Depo Arsip Jl. Gereja Tugu	223.852.420		
5	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - JAKBAR		Pengadaan dan Pengolahan Koleksi Perpustakaan Konvensional untuk Perpustakaan Kota, Perpustakaan Kelurahan dan Kecamatan, Taman Bacaan Masyarakat, dan RPTRA Pengadaan dan Pengolahan Koleksi Perpustakaan Konvensional untuk Perpustakaan RPTRA	653.114.937		
5	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - JAKTIM		Pengadaan dan Pengolahan Koleksi Perpustakaan Konvensional untuk Perpustakaan Kota, Perpustakaan Kelurahan dan Kecamatan, Taman Bacaan Masyarakat, dan RPTRA .	653.114.937		
5	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - JAKSEL		Pengadaan dan Pengolahan Koleksi Perpustakaan Konvensional untuk Perpustakaan Kota, Perpustakaan Kelurahan dan Kecamatan, Taman Bacaan Masyarakat, dan RPTRA .	653.114.937		
5	Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar		Pembinaan Atlet Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta	7.023.600.000		
5	Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar		Pengadaan peralatan olahraga	309.000.000		
5	Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan - JAKBAR		Sertifikasi peserta didik untuk program keahlian		113.000.000	
5	Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan - JAKBAR		Penyusunan Materi Uji Kompetensi (MUK)		79.250.000	
5	Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan - JAKBAR		Pelatihan kompetensi guru Bidang Sosial dan Kepribadian SD	60.000.000		
5	Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan - JAKBAR		Pelatihan kompetensi guru Bidang Sosial dan Kepribadian SMP	40.000.000		
5	Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan - JAKBAR		Pelatihan kompetensi guru Bidang Sosial dan Kepribadian SMA	20.000.000		
5	Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan - JAKBAR		Pelatihan kompetensi guru Pelatihan Kompetensi Guru Bidang Sosial dan Kepribadian SMK	10.000.000		
5	Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan - JAKTIM		Sertifikasi kompetensi guru SMK (Asesor Kompetensi)		142.700.000	
5	Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan - JAKTIM		Pelatihan kompetensi guru bidang sosial dan kepribadian bagi Guru SD	30.000.000		
5	Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan - JAKTIM		Pelatihan kompetensi guru bidang sosial dan kepribadian bagi Guru SMP	25.000.000		
5	Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan - JAKTIM		Pelatihan kompetensi guru bidang sosial dan kepribadian bagi Guru SMA dan SMK	25.000.000		
5	Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan - JAKTIM		Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor	170.714.210		
5	Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan - JAKUT & Kep.Seribu		Sertifikasi peserta didik untuk program keahlian Akuntansi		10.550.000	
5	Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan - JAKUT & Kep.Seribu		Sertifikasi peserta didik untuk program keahlian Teknik Sepeda Motor		21.100.000	
5	Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan - JAKUT & Kep.Seribu		Sertifikasi peserta didik untuk program keahlian Administrasi Perkantoran		10.550.000	
5	Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan - JAKUT & Kep.Seribu		Sertifikasi peserta didik untuk program keahlian teknik kendaraan ringan		10.550.000	
5	Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan - JAKUT & Kep.Seribu		Sertifikasi peserta didik untuk program keahlian teknik pengelasan		21.100.000	
5	Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan - JAKUT & Kep.Seribu		Sertifikasi peserta didik untuk program keahlian teknik listrik		21.100.000	
5	Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan - JAKUT & Kep.Seribu		Sertifikasi peserta didik untuk program keahlian teknik pemesinan		31.650.000	
5	Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan - JAKUT & Kep.Seribu		Penyediaan bahan peraga pelatihan dan sertifikasi		22.083.866	

NO	KOMISI	URAIAN	KEGIATAN	KELUAR POT	MASUK POT	KETERANGAN
5		Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan - JAKUT & Kep.Seribu	Pelatihan kompetensi guru bidang sosial dan kepribadian	65.000.000		
5		RSUD Pasar Minggu	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Non PNS Kesehatan	46.964.952.450		
5		Sudin Pendidikan I - JAKPUS	Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMKN Pariwisata dan Seni	648.000.000		
5		Sudin Pendidikan II - JAKPUS	Rehabilitasi berat gedung Sekolah SDN Kebon Kosong 07 Pagi.		1.290.517.713	
5		Sudin Pendidikan II - JAKPUS	Rehabilitasi berat gedung Sekolah SDN Kebon Kosong 09 Pagi.		1.393.680.661	
5		Sudin Pendidikan II - JAKPUS	Rehabilitasi berat gedung Sekolah SDN Sumur Batu 01 Pagi.		1.312.394.043	
5		Sudin Pendidikan II - JAKPUS	Rehabilitasi berat gedung Sekolah SDN Cempaka Putih Barat 15 Pagi.		1.288.857.722	
5		Sudin Pendidikan II - JAKTIM	Rehabilitasi berat gedung Sekolah SMP Negeri 174		2.616.386.129	
2		Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - JAKPUS	Pengadaan Prasarana dan Sarana PKK di RPTRA		342.540.000	
2		Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - JAKUT	Pengadaan Prasarana dan Sarana Program Pokok PKK di RPTRA		1.224.929.475	
2		Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - JAKBAR	Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Pokok PKK di RPTRA		1.126.457.063	
2		Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - JAKSEL	Penyiapan Sarana dan Prasarana PKL Program Pokok PKK di RPTRA		1.121.013.575	
2		Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - JAKTIM	Pengadaan Prasarana dan Sarana Program Pokok PKK di RPTRA		888.668.000	
2		DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN	Pengadaan Sarana Dagang Bagi PKL		3.999.938.384	
2		DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN	Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Pokok PKK di RPTRA		112.196.975	
2		Unit Pengelola Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik (ERP)	Penyusunan SOP UP Sistem Jalan Berbayar Elektronik		897.070.900	
2		Unit Pengelola Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik (ERP)	Seleksi Penerimaan Pegawai Non PNS UP Sistem Jalan Berbayar Elektronik		179.685.000	
2		Unit Pengelola Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik (ERP)	Gaji Pegawai Non PNS UP Sistem Jalan berbayar Elektronik		1.567.734.910	
2		Unit Pengelola Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik (ERP)	Penyusunan Rencana Strategi Bisnis UP Sistem Jalan		441.582.900	
2		Dinas Perhubungan	Pembangun Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung di Koridor Busway	2.165.011.761		
2		Dinas Perhubungan	Docking Kapal Bidang Transportasi Perairan dan Udara	223.434.850		
2		Dinas Perhubungan	Pelaksanaan Tugas Pegawai Tidak Tetap (PTT)	1.339.162.500		
2		Dinas Perhubungan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung di Koridor Busway	3.005.819.629		
2		Dinas Perhubungan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Koridor Busway		3.233.963.144	
2		Dinas Perhubungan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Koridor Busway Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Koridor Busway		4.908.134.657	
2		Sudin Perhubungan - JAKPUS	Pemeliharaan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung di Non Koridor Busway	518.611.942		
2		Sudin Perhubungan - JAKUT	Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Pendukung di Non Koridor Busway	320.174.350		
2		Sudin Perhubungan - JAKSEL	Pemeliharaan Fasilitas Pendukung Perhubungan di Non Koridor Busway	399.988.239		
2		Sudin Perhubungan - JAKTIM	Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung Lalu Lintas di Non Koridor Busway	596.876.764		
2		Sudin Perhubungan - JAKBAR	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung di Non Koridor Busway	219.607.125		
2		Unit Pengelola Perparkiran	Peningkatan Pelayanan dan Administrasi Perkantoran Unit Pengelola Perparkiran	44.589.783.100		
2		KANTOR PENGELOLA KAWASAN MONAS	Peningkatan Pencahayaan Monas		1.047.458.000	
2		KANTOR PENGELOLA KAWASAN MONAS	Pemeliharaan Gedung Kantor	234.458.000		
2		KANTOR PENGELOLA KAWASAN MONAS	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor	813.000.000		

NO	KOMISI	URAIAN	KEGIATAN	KEUAR/POT	MASUK/POT	KETERANGAN
	2	BADAN PEMBINAAN BUMD DAN PENANAMAN MODAL	Pelaksanaan Seleksi Calon Pengurus BUMD		579.262.500	
	2	BADAN PEMBINAAN BUMD DAN PENANAMAN MODAL	Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengembangan BUMD		334.800.000	
	2	BADAN PEMBINAAN BUMD DAN PENANAMAN MODAL	Penyusunan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan BUMD	587.400.000		
	2	BADAN PEMBINAAN BUMD DAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	94.150.000		
	2	BADAN PEMBINAAN BUMD DAN PENANAMAN MODAL	Penyediaan Makanan dan Minuman	232.499.000		
	2	Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Barat	Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Tata Rias	9.182.118	-	
	2	Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Barat	Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Teknik Las Listrik 3F	-	20.423.145	
	2	Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Barat	Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Teknik Pendingin	-	8.885.485	
	2	Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Barat	Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Teknik Sepeda Motor	5.823.099	-	
	2	Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Barat	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Bahasa Inggris	-	12.971.970	
	2	Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Barat	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Desain Grafis	25.719.128		
	2	Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Barat	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las Listrik	-	84.596.325	
	2	Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Barat	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Otomotif	-	7.044.069	
	2	Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Barat	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata Busana	-	6.077.511	
	2	Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Barat	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata Graha	-	12.885.855	
	2	Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Barat	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Teknik Pendingin/AC	-	35.336.393	
	2	Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Barat	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Teknik Sepeda Motor	336.584	-	
	2	Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Selatan	Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Tata Rias	-	4.335.987	
	2	Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Selatan	Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Teknik Sepeda Motor	-	20.314.118	
	2	Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Selatan	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Desain Grafis	-	7.837.352	
	2	Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Selatan	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Operator Komputer	-	18.655.800	
	2	Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Selatan	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata Boga	-	20.798.966	
	2	Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Selatan	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata Busana	-	6.269.445	
	2	Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Selatan	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata Graha	1.437.184	-	
	2	Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Selatan	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Teknik komputer	-	51.523.141	
	2	Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Selatan	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Teknik Pendingin/AC	-	26.135.154	
	2	Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Selatan	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Teknik Sepeda Motor	-	43.750.774	
	2	Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Timur	Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Operator Komputer	-	15.229.665	
	2	Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Timur	Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Tata Boga	-	8.352.491	
	2	Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Timur	Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Tata Busana	11.307.882	-	
	2	Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Timur	Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Teknik Sepeda Motor	-	3.799.278	
	2	Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Timur	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Bahasa Inggris	-	5.592.675	
	2	Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Timur	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Bahasa Jepang	-	4.208.580	
	2	Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Timur	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Operator Komputer	-	31.764.150	
	2	Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Timur	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Otomotif	-	5.994.154	
	2	Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Timur	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata Boga	5.010.086	-	
	2	Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Timur	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata Busana	11.418.319	-	
	2	Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Timur	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata Rias	-	21.616.551	

NO	KOMISI	URAIAN	KEGIATAN	KELUAR POT	MASUK POT	KETERANGAN
2		Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Timur	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tekmek/ Mesin Bubut	-	24.362.118	
2		Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Timur	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Teknik Pendingin/AC	34.468.874	-	
2		Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Utara	Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Operator Komputer	2.970.000	-	
2		Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Utara	Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Tata Busana	-	962.343	
2		Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Utara	Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Teknik Pendingin	13.655.396	-	
2		Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Utara	Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Teknik Sepeda Motor	13.493.037	-	
2		Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Utara	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Bahasa Inggris	9.072.030	-	
2		Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Utara	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Elektronika/ Industri	-	1.306.888	
2		Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Utara	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Operator Komputer	1.320.098	-	
2		Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Utara	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Otomotif	23.839.238	-	
2		Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Utara	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata Boga	-	16.666.222	
2		Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Utara	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata Graha	3.658.806	-	
2		Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Utara	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Teknik Pendingin/AC	17.062.993	-	
2		Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Utara	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Teknik Sepeda Motor	19.829.901	-	
2		Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Pusat	Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Tata Boga	24.784.043	-	
2		Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Pusat	Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Tata Busana	1.240.268	-	
2		Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Pusat	Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Teknik Pendingin	-	4.462.260	
2		Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Pusat	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata Boga	-	31.970.250	
2		Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Pusat	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata Busana	-	41.558.260	
2		Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Pusat	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata Graha	-	27.960.484	
2		Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Pusat	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Teknik Sepeda Motor	5.857.762	-	
2		Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Pusat	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Teknisi Komputer	12.325.418	-	
2		Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta	Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy	39.600.000	-	
2		Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta	Penyediaan Alat Tulis Kantor	51.352.193	-	
2		Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta	Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Kantor dan Gedung	223.606.263	-	
2		Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta	Penyediaan Makanan dan Minuman	47.626.205	-	
2		Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2.159.850	-	
2		Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	19.800.000	-	
2		Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor	292.491.710	-	
2		Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor	483.945.744	-	
2		Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta	Perawatan Koleksi Museum Prasasti	199.282.340	-	
2		Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta	Perawatan Bangunan Cagar Budaya Museum Prasasti	191.040.765	-	
2		Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta	Perawatan Bangunan Pendukung Museum	147.111.926	-	
2		Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta	Rehab Kantor Unit Pengelola dan Kamar Mandi Publik	162.527.978	-	
2		Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta	Pengadaan Mechanical Electrical/ME	74.452.246	-	
2		Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta	Pemeliharaan Mechanical Electrical/ME	103.035.394	-	
		Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	62.739.204	-	
2		Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	194.233.270	-	

NO	KOMIS	URAIAN	KEGIATAN	KELUAR POT	MASUK POT	KETERANGAN
	2	Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	35.700.000		
		Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	44.507.294		
	2	Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta	Penyediaan jasa perijinan KDO/KDO Khusus	3.817.000		
	2	Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta	Penyediaan peralatan rumah tangga	12.738.000		
	2	Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta	Biaya Piket Sabtu Minggu	129.600.000		
	2	Unit Pengelola Museum Prasasti	Perawatan Bangunan Cagar Budaya Museum Prasasti		191.040.765	
	2	Unit Pengelola Museum Prasasti	Perawatan Bangunan Pendukung Museum		147.111.926	
	2	Unit Pengelola Museum Prasasti	Rehab Kantor Unit Pengelola dan Kamar Mandi Publik		162.527.978	
	2	Unit Pengelola Museum Prasasti	Penyediaan Alat Tulis Kantor		51.352.193	
	2	Unit Pengelola Museum Prasasti	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)		19.800.000	
	2	Unit Pengelola Museum Prasasti	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor		292.491.710	
	2	Unit Pengelola Museum Prasasti	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor		483.945.744	
	2	Unit Pengelola Museum Prasasti	Penyediaan Makanan dan Minuman		47.626.205	
	2	Unit Pengelola Museum Prasasti	Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy		39.600.000	
	2	Unit Pengelola Museum Prasasti	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor		194.233.270	
	2	Unit Pengelola Museum Prasasti	Penyediaan BBM dan Perawatan Mobil Dinas Kantor		80.207.294	
	2	Unit Pengelola Museum Prasasti	Pengadaan Alat Listrik Pakai abis		74.452.246	
	2	Unit Pengelola Museum Prasasti	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		2.159.850	
	2	Unit Pengelola Museum Prasasti	Pajak Mobil Dinas		3.817.000	
	2	Unit Pengelola Museum Prasasti	Penyediaan peralatan rumah tangga		12.738.000	
	2	Unit Pengelola Museum Prasasti	Perawatan Peralatan dan Furniture Kantor		62.739.204	
	2	Unit Pengelola Museum Prasasti	Biaya Piket Sabtu Minggu		129.600.000	
	2	Unit Pengelola Museum Prasasti	Perawatan AC		45.738.000	
	2	Unit Pengelola Museum Prasasti	Perawatan CCTV		57.297.394	
	2	Unit Pengelola Museum Prasasti	Jasa Penunjang Kantor lainnya		223.606.263	
	2	Unit Pengelola Museum Prasasti	Perawatan Koleksi Museum Prasasti		199.282.340	
	4	BPLHD	Pemeliharaan Gedung BPLHD	502.494.189		
	4	BPLHD	Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengkajian Kebijakan Lingkungan Hidup	482.108.760		
	4	BPLHD	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	118.000.000		
	4	BPLHD	Pemantauan Kualitas Lingkungan Air Tanah	193.842.000		
	4	BPLHD	Pemantauan Kualitas Lingkungan Air Situ/Waduk	91.800.000		
	4	BPLHD	Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim)	171.050.000		
	4	BPLHD	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup (Limbah B3)	83.836.000		
	4	BPLHD	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup (Emisi Tidak Bergerak)	7.500.000		
	4	BPLHD	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup (Air Limbah)	50.600.000		
	4	BPLHD	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (PROPER)	96.300.000		
	4	BPLHD	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja	110.529.375		
	4	BPLHD	Penyediaan Sarana dan prasarana kerja Pengawasan	21.598.500		
	4	BPLHD	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	86.650.000		
	4	Dinas Perumahan dan Gedung Pemda	Pembangunan Rumah Susun di Provinsi DKI Jakarta	17.500.000.000		
	4	Dinas Perumahan dan Gedung Pemda	Pengadaan Tanah Perumahan dan Gedung Pemda di Provinsi DKI	200.000.000.000		
	4	Dinas Penataan Kota	Penyusunan Ketentuan Panduan Rancang Kota	-	44.800.000	
	4	Dinas Penataan Kota	Penyempurnaan dan Integrasi Model Data Base Pendataan Ruang Kota 3D di DKI Jakarta	-	2.096.160.000	
	4	Dinas Penataan Kota	Pengayaan Peta Operasional Kota Adm. Jakarta Barat	-	819.280.000	
	4	Dinas Penataan Kota	Pekerjaan Penentuan Garis Sempadan Pantai Kawasan di pulau pemukiman	-	75.780.638	

NO	KOMISI	URAIAN	KEGIATAN	KELUAR/POT	MASUK/POT	KETERANGAN
4	Dinas Penataan Kota		Sewa Alat Inspeksi Bangunan	-	220.000.000	
4	Dinas Penataan Kota		Pengembangan dan Pemeliharaan Jakarta City Planning Gallery	-	452.680.080	
4	Dinas Penataan Kota		Pendataan dan Otomasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta	-	3.495.855.000	
4	Dinas Penataan Kota		Penyempurnaan dan Pengayaan Informasi data P4T	-	2.007.500.000	
4	Dinas Penataan Kota		Pengadaan Perangkat Jaringan	72.849.590	-	
4	Dinas Penataan Kota		Pengadaan Perangkat Lunak	-	159.637.500	
4	Dinas Penataan Kota		Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	-	784.729.000	
4	Dinas Penataan Kota		Pemeliharaan Gedung Dinas Teknis Jatibaru	3.630.000	-	
4	Dinas Penataan Kota		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	92.400.000	-	
4	Dinas Penataan Kota		Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	3.596.500	-	
4	Suku Dinas Penataan Kota Administrasi Jakarta Pusat		Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	1.194.000		
4	Suku Dinas Penataan Kota Administrasi Jakarta Pusat		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	1.750.000		
4	Suku Dinas Penataan Kota Administrasi Jakarta Pusat		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor	600.000		
4	Suku Dinas Penataan Kota Administrasi Jakarta Utara		Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	1.194.000		
4	Suku Dinas Penataan Kota Administrasi Jakarta Barat		Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	1.194.000		
4	Suku Dinas Penataan Kota Administrasi Jakarta Selatan		Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	1.194.000		
4	Suku Dinas Penataan Kota Administrasi Jakarta Timur		Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	1.194.000		
4	Suku Dinas Penataan Kota Administrasi Kepulauan Seribu		Pemeriksaan Untuk Nota Penjelasan Pemeriksaan Lapangan Sebagai Bahan Rekomendasi Teknis PTSP Kepulauan Seribu		45.000.000	
4	Suku Dinas Penataan Kota Administrasi Kepulauan Seribu		Penyediaan Sewa Rumah Dinas		72.000.000	
4	Dinas Kebersihan		Pengadaan Alat Angkut Kebersihan Truk Compactor	82.500.000.000	-	
4	Dinas Kebersihan		Pengadaan alat-alat berat kebersihan	102.000.000.000	-	
4	Dinas Kebersihan		Pengadaan Alat Angkut Kebersihan Gerobak	25.000.000.000	-	
4	Dinas Kebersihan		Penanganan Kebersihan dengan Pekerja	1.719.708.550	-	
4	UPST Dinas Kebersihan		Pembangunan Jembatan Timbang Masuk dan	-	5.645.170.318	
4	UPST Dinas Kebersihan		Penanganan Kebersihan dengan Pekerja	10.646.177.950	-	
4	UPST Dinas Kebersihan		Badan Pengendalian TPST Bantargebang	-	84.000.000	
4	UPST Dinas Kebersihan		Jasa Jalan Tol Kendaraan Angkutan Sampah	-	582.509.760	
4	UPST Dinas Kebersihan		Pengolahan Air Sampah TPST Bantargebang	-	9.130.009	
4	UPST Dinas Kebersihan		Pengolahan dan Pemeliharaan Plant Daur Ulang Plastik dan Plant Kompos TPST Bantargebang	-	376.242.922	
4	UPST Dinas Kebersihan		Pengolahan dan Pemeliharaan Sumur Gas dan Perpipaan Gas TPST Bantargebang	-	239.580.000	
4	UPST Dinas Kebersihan		Pemeliharaan ATPM Kendaraan Unit Pengelola Sampah Terpadu	-	6.305.600.088	
4	UPST Dinas Kebersihan		Pemeliharaan Drainase TPST Bantargebang	4.056.147.362	-	
4	UPST Dinas Kebersihan		Pemeliharaan PJU TPST Bantargebang	-	174.240.000	
4	UPST Dinas Kebersihan		Pengadaan Ban SPA Sunter	-	1.083.059.780	
4	UPST Dinas Kebersihan		Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	33.376.483.440	-	
4	UPST Dinas Kebersihan		Pengadaan Obat Penghilang Bau di Area SPA Sunter dan Sentra 3R	-	187.000.000	
4	UPST Dinas Kebersihan		Penyediaan Makanan dan Minuman	204.400.000	-	
4	UPST Dinas Kebersihan		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	576.017.500	-	
4	UPST Dinas Kebersihan		Pelaksanaan Perhitungan Tipping Fee Pengolahan Sampah DKI Jakarta	-	149.850.000	
4	UPK BA Dinas Kebersihan		Pengadaan alat berat kebersihan air	125.098.371.805	-	
4	UPK BA Dinas Kebersihan		Penyedia Jasa TALI	6.821.155.000	-	
4	Sudin Kebersihan Jakarta Utara		Penyediaan BBM KDO / KDO Khusus	1.847.812.500	-	
4	Sudin Kebersihan Jakarta Utara		Pengadaan Ban KDO / KDO Khusus	455.532.000	-	
4	Sudin Kebersihan Jakarta Utara		Pemeliharaan Gerobak Motor	-	35.978.096	

NO	KOMISI	URAIAN	KEGIATAN	KELUAR/POT	MASUK/POT	KETERANGAN
4	Sudin Kebersihan Jakarta Selatan		Peningkatan Tempat Pembuangan Sampah Ramah Lingkungan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan	1.767.788.391	-	
4	Sudin Kebersihan Jakarta Selatan		Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Ramah Lingkungan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan	-	1.102.126.604	
4	Sudin Kebersihan Jakarta Timur		Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	-	37.870.800	
4	Dinas Bina Marga		Pembangunan/Peningkatan Jalan - Jalan Strategis di Provinsi DKI Jakarta	44.508.878.625	-	
4	Dinas Bina Marga		Pembangunan Jembatan di atas kali Pesangrahan, Sespolan, Pasar Jumat	-	4.996.317.420	
4	Dinas Bina Marga		Pembangunan Simpang Tidak Sebidang Bintaro Permai - Rel KA	6.256.196.511	-	
4	Dinas Bina Marga		Pembangunan Fly Over Pancoran	18.281.547.423	-	
4	Dinas Bina Marga		Pembangunan Underpass Mampang - Kuningan	17.927.690.936	-	
4	Dinas Bina Marga		Pembangunan Underpass Matraman - Salemba	6.371.054.143	-	
4	Dinas Bina Marga		Pemeliharaan Simpang dan Jalan Tak Sebidang di Provinsi DKI Jakarta	40.000.000.000	-	
4	Dinas Bina Marga		Pemeliharaan dan Pengelolaan Pompa Underpass Provinsi DKI Jakarta	7.193.218.901	-	
4	Dinas Bina Marga		Pemeliharaan Jalan di Kompleks Instansi Vertikal	15.000.000.000	-	
4	Dinas Bina Marga		Pemeliharaan Berkala Jalan Arteri, Kolektor di Jakarta Pusat	10.000.000.000	-	
4	Dinas Bina Marga		Pemeliharaan Berkala Jalan Arteri, Kolektor di Jakarta Utara	30.000.000.000	-	
4	Dinas Bina Marga		Pemeliharaan Berkala Jalan Arteri, Kolektor di Jakarta Barat	20.000.000.000	-	
4	Dinas Bina Marga		Pemeliharaan Berkala Jalan Arteri, Kolektor di Jakarta Selatan	20.000.000.000	-	
4	Dinas Bina Marga		Pemeliharaan Berkala Jalan Arteri, Kolektor di Jakarta Timur	30.000.000.000	-	
4	Dinas Bina Marga		Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi DKI Jakarta	-	19.880.210.000	
4	Dinas Bina Marga		Pemeliharaan Rutin Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan di Provinsi DKI Jakarta	-	5.000.000.000	
4	Dinas Bina Marga		Optimalisasi Penggunaan Kendaraan Alat-alat Berat/ Operator untuk Mendukung Bidang Kebinarmargaan	1.508.579.520	-	
4	Dinas Bina Marga		Pemeliharaan Alat-Alat Berat beserta kelengkapannya	618.572.900	-	
4	Dinas Bina Marga		Pengadaan Alat-Alat Berat beserta kelengkapannya Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	1.776.877.513	-	
4	Dinas Bina Marga		Pembangunan Prasarana Jaringan Utilitas	5.000.000.000	-	
4	Dinas Bina Marga		Pengadaan Perkakas Kerja Unit Alkal Bina Marga	165.465.382	-	
4	Dinas Bina Marga		Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	-	960.331.680	
4	Dinas Bina Marga		Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor	354.373.440	-	
4	Dinas Bina Marga		Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor	173.790.800	-	
4	Dinas Bina Marga		Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	-	455.621.312	
4	Dinas Bina Marga		Penyediaan Makanan dan Minuman	-	69.300.000	
4	Dinas Bina Marga		Perencanaan STS Lenteng Agung-FISIP	-	-	
4	Dinas Bina Marga		Pengelolaan Helpdesk Respon Opini Publik Pengaduan Masyarakat	127.808.040	-	
4	Dinas Bina Marga		Pengadaan Sarana Prasarana Pengelolaan Data dan Informasi	300.000.000	-	
4	Sudin Bina Marga - JAKPUS		Pembangunan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan di Kecamatan Cempaka Putih	-	7.000.000.000	
4	Sudin Bina Marga - JAKPUS		Pembangunan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan di Kecamatan Gambir	-	7.000.000.000	
4	Sudin Bina Marga - JAKPUS		Pembangunan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan di Kecamatan Kemayoran	-	7.000.000.000	
4	Sudin Bina Marga - JAKPUS		Pembangunan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan di Kecamatan Menteng	-	2.000.000.000	
4	Sudin Bina Marga - JAKPUS		Pembangunan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan di Kecamatan Sawah Besar	-	1.000.000.000	

NO	KOMISI	URAIAN	KEGIATAN	KELUAR POT	MASUK POT	KETERANGAN
4	Sudin Bina Marga - JAKPUS		Pembangunan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan di Kecamatan Senen	-	3.000.000.000	
4	Sudin Bina Marga - JAKPUS		Pembangunan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan di Kecamatan Tanah Abang	-	2.900.000.000	
4	Sudin Bina Marga - JAKPUS		Pemeliharaan Berkala Jalan di Kecamatan Gambir	2.000.000.000	-	
4	Sudin Bina Marga - JAKPUS		Pemeliharaan Berkala Jalan di Kecamatan Kemayoran	1.000.000.000	-	
4	Sudin Bina Marga - JAKPUS		Pemeliharaan Jalan Lingkungan, Orang dan Saluran Pemeliharaan Jalan Lingkungan, Orang dan Saluran di Kecamatan Cempaka Putih	1.000.000.000	-	
4	Sudin Bina Marga - JAKPUS		Pemeliharaan Jalan Lingkungan, Orang dan Saluran Pemeliharaan Jalan Lingkungan, Orang dan Saluran di Kecamatan Gambir	1.500.000.000	-	
4	Sudin Bina Marga - JAKPUS		Pemeliharaan Jalan Lingkungan, Orang dan Saluran Pemeliharaan Jalan Lingkungan, Orang dan Saluran di Kecamatan Johar Baru	2.000.000.000	-	
4	Sudin Bina Marga - JAKPUS		Pemeliharaan Jalan Lingkungan, Orang dan Saluran Pemeliharaan Jalan Lingkungan, Orang dan Saluran di Kecamatan Kemayoran	1.500.000.000	-	
4	Sudin Bina Marga - JAKPUS		Pemeliharaan Jalan Lingkungan, Orang dan Saluran Pemeliharaan Jalan Lingkungan, Orang dan Saluran di Kecamatan Menteng	3.000.000.000	-	
4	Sudin Bina Marga - JAKPUS		Pemeliharaan Jalan Lingkungan, Orang dan Saluran Pemeliharaan Jalan Lingkungan, Orang dan Saluran di Kecamatan Sawah Besar	2.000.000.000	-	
4	Sudin Bina Marga - JAKPUS		Pemeliharaan Jalan Lingkungan, Orang dan Saluran Pemeliharaan Jalan Lingkungan, Orang dan Saluran di Kecamatan Senen	2.000.000.000	-	
4	Sudin Bina Marga - JAKPUS		Pemeliharaan Jalan Lingkungan, Orang dan Saluran Pemeliharaan Jalan Lingkungan, Orang dan Saluran di Kecamatan Tanah Abang	2.000.000.000	-	
4	Sudin Bina Marga - JAKUT		Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan di Kecamatan Tanjung Priok	-	3.019.963.200	
4	Sudin Bina Marga - JAKUT		Pembangunan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan Pembangunan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan di Kecamatan Penjarangan	1.955.800.000	-	
4	Sudin Bina Marga - JAKUT		Pembangunan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan Pembangunan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan di Kecamatan Pademangan	1.955.800.000	-	
4	Sudin Bina Marga - JAKUT		Pembangunan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan Pembangunan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan di Kecamatan Tanjung Priok	1.955.800.000	-	
4	Sudin Bina Marga - JAKUT		Pembangunan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan Pembangunan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan di Kecamatan Koja	1.955.800.000	-	
4	Sudin Bina Marga - JAKUT		Pembangunan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan Pembangunan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan di Kecamatan Kelapa Gading	1.955.800.000	-	
4	Sudin Bina Marga - JAKUT		Pembangunan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan Pembangunan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan di Kecamatan Cilincing	1.955.800.000	-	
4	Sudin Bina Marga - JAKUT		Pemeliharaan Jalan Lingkungan, Orang dan Saluran Pemeliharaan Jalan Lingkungan, Orang dan Saluran di Kecamatan Koja	-	3.000.000.000	
4	Sudin Bina Marga - JAKUT		Pemeliharaan Jalan Lingkungan, Orang dan Saluran Pemeliharaan Jalan Lingkungan, Orang dan Saluran di Kecamatan Kelapa Gading	-	3.000.000.000	

NO	KOMISI	URAIAN	KEGIATAN	KELUAR POT	MASUK POT	KETERANGAN
4		Sudin Bina Marga - JAKUT	Pemeliharaan Jalan Lingkungan, Orang dan Saluran Pemeliharaan Jalan Lingkungan, Orang dan Saluran di Kecamatan Cilincing	-	3.000.000.000	
4		Sudin Bina Marga - JAKUT	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	285.163.200	-	
4		Sudin Bina Marga - JAKBAR	Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan di Kecamatan Cengkareng	1.298.976.593	-	
4		Sudin Bina Marga - JAKBAR	Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan di Kecamatan Kalideres	1.000.000.000	-	
4		Sudin Bina Marga - JAKBAR	Pemeliharaan Berkala Jalan di Kecamatan Tamansari	1.000.000.000	-	
4		Sudin Bina Marga - JAKBAR	Pemeliharaan Berkala Jalan di Kecamatan Kebon Jeruk	1.000.000.000	-	
4		Sudin Bina Marga - JAKBAR	Pemeliharaan Berkala Jalan di Kecamatan Kembangan	2.000.000.000	-	
4		Sudin Bina Marga - JAKBAR	Pemeliharaan rutin jalan, jembatan, trotoar dan bangunan pelengkapnya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat	-	6.477.797.784	
4		Sudin Bina Marga - JAKBAR	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	-	880.000	
4		Sudin Bina Marga - JAKBAR	Penyediaan Alat Tulis Kantor	56.128.051	-	
4		Sudin Bina Marga - JAKBAR	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.758.825	-	
4		Sudin Bina Marga - JAKBAR	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	67.782.240	-	
4		Sudin Bina Marga - JAKBAR	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	36.894.000	-	
4		Sudin Bina Marga - JAKBAR	Pemeliharaan KDO/KDO Khusus di Kota administrasi Jakarta Barat	-	13.861.925	
4		Sudin Bina Marga - JAKTIM	Pemeliharaan Berkala Jalan di Kecamatan Cakung	5.492.419.765	-	
4		Sudin Bina Marga - JAKTIM	Pemeliharaan Berkala Jalan di Kecamatan Cipayung	3.465.736.695	-	
4		Sudin Bina Marga - JAKTIM	Pemeliharaan Berkala Jalan di Kecamatan Ciracas	2.401.960.220	-	
4		Sudin Bina Marga - JAKTIM	Pemeliharaan Berkala Jalan di Kecamatan Duren Sawit	6.586.836.928	-	
4		Sudin Bina Marga - JAKTIM	Pemeliharaan Berkala Jalan di Kecamatan Jatinegara	3.265.066.660	-	
4		Sudin Bina Marga - JAKTIM	Pemeliharaan Berkala Jalan di Kecamatan Kramat Jati	2.659.745.747	-	
4		Sudin Bina Marga - JAKTIM	Pemeliharaan Berkala Jalan di Kecamatan Makasar	1.680.426.184	-	
4		Sudin Bina Marga - JAKTIM	Pemeliharaan Berkala Jalan di Kecamatan Pasar Rebo	1.506.072.422	-	
4		Sudin Bina Marga - JAKTIM	Pemeliharaan Berkala Jalan di Kecamatan Pulogadung	3.862.988.187	-	
4		Sudin Bina Marga - JAKTIM	Pemeliharaan Jalan Lingkungan, Orang dan Saluran di Kecamatan Cakung	-	2.135.006.246	
4		Sudin Bina Marga - JAKTIM	Pemeliharaan Jalan Lingkungan, Orang dan Saluran di Kecamatan Ciracas	-	2.489.776.794	
4		Sudin Bina Marga - JAKTIM	Pemeliharaan Jalan Lingkungan, Orang dan Saluran di Kecamatan Cipayung	-	2.200.000.000	
4		Sudin Bina Marga - JAKTIM	Pemeliharaan Jalan Lingkungan, Orang dan Saluran di Kecamatan Duren Sawit	-	6.000.000.000	
4		Sudin Bina Marga - JAKTIM	Pemeliharaan Jalan Lingkungan, Orang dan Saluran di Kecamatan Jatinegara	-	3.000.000.000	
4		Sudin Bina Marga - JAKTIM	Pemeliharaan Jalan Lingkungan, Orang dan Saluran di Kecamatan Makasar	-	3.000.000.000	
4		Sudin Bina Marga - JAKTIM	Pemeliharaan Jalan Lingkungan, Orang dan Saluran di Kecamatan Matraman	-	4.723.886.636	
4		Sudin Bina Marga - JAKTIM	Pemeliharaan Jalan Lingkungan, Orang dan Saluran di Kecamatan Pasar Rebo	-	5.701.033.132	
4		Sudin Bina Marga - JAKTIM	Pemeliharaan Jalan Lingkungan, Orang dan Saluran di Kecamatan Pulogadung	-	2.100.000.000	
4		Sudin Bina Marga - JAKTIM	Pengadaan Alat-Alat Berat beserta kelengkapannya	428.450.000	-	
4		DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROV DKI JAKARTA	Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Taman di Provinsi DKI Jakarta	300.000.000.000	-	
4		DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROV DKI JAKARTA	Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Makam di Provinsi DKI Jakarta	100.000.000.000	-	
4		DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROV DKI JAKARTA	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman di Jl. Manunggal II Komp. Kodam Jaya Kelurahan Cipinang Kecamatan Makassar, Jakarta Timur	148.905.003	-	

NO	KOMISI	URAIAN	KEGIATAN	KELUAR:POT	MASUK:POT	KETERANGAN
	4	DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROV DKI JAKARTA	Pengawasan dan Pengendalian Pertamanan dan Pemakaman	-	60.103.200	
	4	DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROV DKI JAKARTA	Pengadaan Bahan Bangunan untuk Perbaikan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau	3.000.000.000	-	
	4	DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROV DKI JAKARTA	Penataan TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat	477.089.770	-	
	4	DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROV DKI JAKARTA	Penataan TPU Pondok Ranggong, Jakarta Timur	1.599.904.645	-	
	4	DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROV DKI JAKARTA	Penataan TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan	500.000.000	-	
	4	DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROV DKI JAKARTA	Penataan TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan	-	2.969.321.880	
	4	DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROV DKI JAKARTA	Penataan TPU Semper, Jakarta Utara	-	-	
	4	DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROV DKI JAKARTA	Penataan Kebun Bibit Srengseng, Jakarta Barat	969.057.546	-	
	4	DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROV DKI JAKARTA	Penataan Jalur Hijau di Pinggir Kali Mookervart, Jakarta Barat	-	1.966.021.134	
	4	DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROV DKI JAKARTA	Penataan Jalur Hijau di Pinggir di Jl. Daan Mogot (Batas Kota), Jakarta Barat	-	2.104.626.423	
	4	DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROV DKI JAKARTA	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman dan Jalur Hijau di Wilayah Jakarta Timur	-	1.489.053.528	
	4	DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROV DKI JAKARTA	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman dan Jalur Hijau di Wilayah Jakarta Barat	-	329.960.004	
	4	DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROV DKI JAKARTA	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman dan Jalur Hijau di Wilayah Jakarta Utara	-	2.415.984.240	
	4	DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROV DKI JAKARTA	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman dan Jalur Hijau di Wilayah Jakarta Selatan	795.708.120	-	
	4	DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROV DKI JAKARTA	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman dan Jalur Hijau di Wilayah Jakarta Pusat	-	1.411.385.560	
	4	DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROV DKI JAKARTA	Penataan Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat	-	3.319.683.254	
	4	DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROV DKI JAKARTA	Penataan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau Taman dan Makam	2.000.000.000	-	
	4	DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROV DKI JAKARTA	Pembangunan Sarana Penyiraman di Fly Over	-	1.032.214.486	
	4	DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROV DKI JAKARTA	Pembangunan Air Mancur Taman Cattleya, Jakarta Barat	-	802.436.527	
	4	DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROV DKI JAKARTA	Pembayaran Premi Asuransi Akibat Bencana Pohon Tumbang	-	250.000.000	
	4	DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROV DKI JAKARTA	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pemakaman	-	704.551.000	
	4	DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROV DKI JAKARTA	Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy	-	-	
	4	DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROV DKI JAKARTA	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	175.000.000	-	
	4	DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROV DKI JAKARTA	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Khusus	-	-	
	4	DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROV DKI JAKARTA	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman di Jl. Kebagusan II RT 07/04 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan	-	1.219.980.187	
	4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakpus	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kecamatan Tanah Abang	-	979.861.640	
	4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakpus	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kecamatan Senen	-	383.424.120	
	4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakpus	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kecamatan Gambir	-	1.308.314.560	
	4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakpus	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kecamatan Menteng	-	1.546.065.000	
	4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakpus	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kecamatan Kemayoran	-	162.165.040	
	4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakpus	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kecamatan Cempaka Putih	-	247.370.400	
	4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakpus	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kecamatan Johar Baru	-	375.178.440	
	4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakpus	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kecamatan Sawah Besar	-	795.708.120	
	4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakpus	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Kecamatan Tanah Abang	233.627.600	-	
	4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakpus	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Kecamatan Senen	-	1.249.220.520	
	4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakpus	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Kecamatan Kemayoran	-	929.013.280	
	4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakpus	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Kecamatan Menteng	-	386.172.680	

NO	KOMISI	URAIAN	KEGIATAN	KELUAR POT	MASUK POT	KETERANGAN
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakpus	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Kecamatan Cempaka Putih		-	405.412.600	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakpus	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Kecamatan Johar Baru		-	127.808.040	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakpus	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Kecamatan Sawah Besar		-	1.027.961.440	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakpus	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Makam di Wilayah Jakarta Pusat		-	946.878.920	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakpus	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Kecamatan Gambir		-	1.137.903.840	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakpus	Penataan Taman di Wilayah Jakarta Pusat		-	2.371.903.091	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakpus	Penataan Jalur Hijau di Wilayah Jakarta Pusat		979.883.747	-	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakpus	Penataan Makam di Wilayah Jakarta Pusat		755.505.135	-	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakpus	Penataan Kebun Bibit di Wilayah Jakarta Pusat		276.626.308	-	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakpus	Penyediaan Makanan dan Minuman		12.672.000	-	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakpus	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus		70.471.800	-	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakpus	Pengadaan Pakaian Kerja dan Kelengkapan untuk Perawatan Ruang Terbuka Hijau		-	349.199.033	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakpus	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus		-	46.904.700	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakpus	Penyediaan BBM Peralatan Kerja		67.682.835	-	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakpus	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Perawatan Taman dan Makam		310.000.000	-	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakbar	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kecamatan Cengkareng		-	658.280.120	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakbar	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kecamatan Kalideres		111.316.680	-	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakbar	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kecamatan Kebon Jeruk		-	764.099.680	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakbar	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kecamatan Kembangan		-	1.335.800.160	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakbar	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kecamatan Palmerah		-	177.282.120	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakbar	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kecamatan Taman Sari		-	213.013.400	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakbar	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kecamatan Tambora		-	251.493.240	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakbar	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Kecamatan Grogol Petamburan		-	439.769.600	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakbar	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Kecamatan Kalideres		-	56.345.480	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakbar	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Kecamatan Kebon Jeruk		-	784.713.880	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakbar	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Kecamatan Kembangan		-	636.291.640	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakbar	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Kecamatan Palmerah		-	384.798.400	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakbar	Penataan Jalur Hijau di Wilayah Jakarta Barat		-	1.523.442.013	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakbar	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pemakaman		80.000.000	-	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakbar	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Perawatan Taman dan Makam		202.931.227	-	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaksel	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kecamatan Kebayoran Baru		-	2.737.565.760	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaksel	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kecamatan Pesanggrahan		-	43.976.960	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaksel	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kecamatan Kebayoran Lama		-	904.276.240	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaksel	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kecamatan Cilandak		-	963.370.280	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaksel	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kecamatan Pasar Minggu		-	552.460.560	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaksel	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kecamatan Jagakarsa		-	388.921.240	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaksel	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kecamatan Mampang Prapatan		-	213.013.400	

NO	KOMISI	URAIAN	KEGIATAN	KELUAR/POT	MASUK/POT	KETERANGAN
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaksel	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kecamatan Tebet		-	294.095.920	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaksel	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kecamatan Setiabudi		-	553.834.840	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaksel	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kecamatan Pancoran		-	426.026.800	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaksel	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Kecamatan Kebayoran Baru		-	1.326.180.200	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaksel	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Kecamatan Cilandak		-	448.015.280	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaksel	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Kecamatan Pasar Minggu		-	379.301.280	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaksel	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Kecamatan Pesanggrahan		-	452.138.120	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaksel	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Kecamatan Kebayoran Lama		-	746.234.040	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaksel	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Kecamatan Jagakarsa		511.232.160	-	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaksel	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Kecamatan Mampang Prapatan		-	336.698.600	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaksel	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Kecamatan Tebet		92.076.760	-	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaksel	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Kecamatan Pancoran		-	72.836.840	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaksel	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Kecamatan Setiabudi		-	228.130.480	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaksel	Penataan Ruang Terbuka Hijau Taman di Wilayah Jakarta Selatan		-	-	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaksel	Penataan Ruang Terbuka Hijau Jalur Hijau di Wilayah Jakarta Selatan		-	2.263.757.166	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaksel	Penataan Ruang Terbuka Hijau Makam di Wilayah Jakarta Selatan		1.133.786.338	-	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaksel	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)		18.882.000	-	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaksel	Pengadaan Pakaian Kerja dan Kelengkapan untuk Perawatan Ruang Terbuka Hijau		-	100.504.287	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaksel	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Khusus		500.000.000	-	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaktim	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kecamatan Jatinegara		-	1.533.696.480	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaktim	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kecamatan Cakung		-	153.919.360	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaktim	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kecamatan Cipayung		930.387.560	-	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaktim	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kecamatan Ciracas		338.072.880	-	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaktim	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kecamatan Kramat Jati		-	340.821.440	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaktim	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kecamatan Matraman		-	170.410.720	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaktim	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kecamatan Pulogadung		-	766.848.240	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaktim	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kecamatan Duren Sawit		-	2.296.421.880	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaktim	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kecamatan Pasar Rebo		-	170.410.720	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaktim	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kecamatan Makasar		-	383.424.120	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaktim	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Kecamatan Jatinegara		-	1.789.312.560	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaktim	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Kecamatan Cakung		-	3.663.830.480	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaktim	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Kecamatan Cipayung		-	1.363.285.760	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaktim	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Kecamatan Ciracas		-	979.861.640	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaktim	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Kecamatan Kramat Jati		-	1.533.696.480	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaktim	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Kecamatan Matraman		-	1.448.491.120	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaktim	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Kecamatan Pulogadung		-	3.493.419.760	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaktim	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Kecamatan Duren Sawit		-	4.089.857.280	

NO	KOMISI	URAIAN	KEGIATAN	KELUAR/POT	MASUK/POT	KETERANGAN
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaktim		Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Kecamatan Pasar Rebo	-	596.437.520	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaktim		Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Kecamatan Makasar	-	1.448.491.120	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaktim		Penataan Taman di wilayah Jakarta Timur	264.717.196	-	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaktim		Penataan Makam di wilayah Jakarta Timur	996.647.563	-	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaktim		Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	-	239.878.800	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaktim		Penyediaan BBM untuk Peralatan Kerja	-	685.423	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaktim		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Perawatan Taman dan Makam di wilayah Jakarta Timur	500.000.000	-	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaktim		Pengadaan Pakaian Kerja dan Kelengkapan untuk Perawatan Ruang Terbuka Hijau di wilayah Jakarta Timur	-	580.251.658	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaktim		Pengadaan Rumput, Tanah Merah dan Sarana Pembibitan	499.603.500	-	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakut		Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kecamatan Kelapa Gading	-	2.160.368.160	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakut		Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kecamatan Pademangan	-	170.410.720	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakut		Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kecamatan Penjaringan	2.079.285.640	-	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakut		Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kecamatan Tanjung Priok	-	1.697.235.800	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakut		Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kecamatan Koja	-	636.291.640	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakut		Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kecamatan Cilincing	-	1.576.299.160	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakut		Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Kecamatan Kelapa Gading	-	2.343.147.400	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakut		Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Kecamatan Pademangan	-	1.022.464.320	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakut		Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Kecamatan Penjaringan	-	1.789.312.560	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakut		Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Kecamatan Tanjung Priok	-	2.935.462.080	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakut		Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Kecamatan Koja	-	426.026.800	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakut		Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Kecamatan Cilincing	-	1.661.504.520	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakut		Penataan Jalur Hijau di Wilayah Jakarta Utara	471.290.242	-	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakut		Penataan Makam di Wilayah Jakarta Utara	669.530.225	-	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakut		Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	41.160.000	-	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakut		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Perawatan Taman dan Makam	652.814.346	-	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakut		Pengadaan Pakaian Kerja dan Kelengkapan untuk Perawatan Ruang Terbuka Hijau	-	461.569.791	
4	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakut		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Khusus	-	165.000.000	
4	Dinas Tata Air		Pengadaan Alat-Alat Berat beserta kelengkapannya Dinas Tata Air	64.121.447.758	-	
4	Dinas Tata Air		Peningkatan Pemanfaatan Alat-alat berat untuk mendukung Peningkatan kapasitas waduk/kali/saluran	4.651.136.900	-	
4	Dinas Tata Air		Pemeliharaan Alat-Alat Berat beserta kelengkapannya	4.281.316.774	24.917.067.120	
4	Dinas Tata Air		Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air/IPA	93.507.847.634	-	
4	Dinas Tata Air		Perbaikan Infrastruktur Saluran/Kali sistem aliran tengah	-	-	
4	Dinas Tata Air		Pengadaan Tanah untuk sungai/saluran	50.000.000.000	-	
4	Dinas Tata Air		Pengadaan Tanah untuk waduk/situ/embung	100.000.000.000	-	
4	Dinas Tata Air		Pembangunan sistem pengelolaan air limbah	-	6.852.075.600	
4	Dinas Tata Air		Pengadaan Perlengkapan Pendukung Pengukuran	-	19.250.000	
4	Dinas Tata Air		Pemeliharaan Alat Laboratorium dan Lapangan	-	66.000.000	
4	Dinas Tata Air		Pengadaan Asesoris Penyelidikan dan Pengujian	-	19.157.567	
4	Dinas Tata Air		Pengadaan Barang peralatan kerja lapangan dan Perkakas Kerja Bengkel Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air	2.158.920.665	-	

NO	KOMISI	URAIAN	KEGIATAN	KELUAR POT	MASUK POT	KETERANGAN
4	Dinas Tata Air		Penilai Appraisal untuk Pengadaan Tanah Bidang Tata Air	500.000.000	-	
4	Dinas Tata Air		Dokumen lingkungan kegiatan sewerage system development project in DKI Jakarta Zona 5		1.176.351.000	
4	Dinas Tata Air		Dokumen lingkungan kegiatan sewerage system development project in DKI Jakarta Zona 8	1.222.551.000	-	
4	Dinas Tata Air		Pengelolaan Helpdesk Command Center Pengaduan Masyarakat, Monitoring Banjir, dan Pengelolaan Data dan Informasi Dinas Tata Air		968.934.000	
4	Dinas Tata Air		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jaringan Teknologi Informasi Dinas Tata Air		165.422.633	
4	Sudin Tata Air Jakarta Pusat		Pemeliharaan Alat-Alat Berat beserta kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Pusat	536.981.500	189.238.102	
4	Sudin Tata Air Jakarta Pusat		Pemeliharaan Sumur Resapan, Imbuan dan Pengisian (Recharge) Air Tanah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	193.635.172	54.174.654	
4	Sudin Tata Air Jakarta Pusat		Pengelolaan Pompa Stasioner, Pompa Mobile, Pintu Air, Bangunan Rumah Pompa serta Rumah Jaga dan Kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	592.096.550	10.543.884.656	
4	Sudin Tata Air Jakarta Pusat		Perbaikan Infrastruktur Saluran, Saluran Penghubung dan Kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	15.208.563.422	20.246.379.669	
4	Sudin Tata Air Jakarta Utara		Pemeliharaan Alat-Alat Berat beserta kelengkapannya	1.049.454.111	-	
4	Sudin Tata Air Jakarta Utara		Pengelolaan Pompa Stasioner, Pompa Mobile, Pintu Air, Bangunan Rumah Pompa serta Rumah Jaga dan Kelengkapannya	1.940.777.392	-	
4	Sudin Tata Air Jakarta Utara		Perbaikan Infrastruktur Saluran/ Saluran Penghubung di Wilayah Jakarta Utara	-	1.233.150.440	
4	Sudin Tata Air Jakarta Utara		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah di Wilayah Jakarta Utara	-	1.786.913.203	
4	Sudin Tata Air Jakarta Utara		Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	24.192.000		
4	Sudin Tata Air Jakarta Utara		Penyediaan Makanan dan Minuman	15.126.540		
4	Sudin Tata Air Jakarta Utara		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	-	9.486.400	
4	Sudin Tata Air Jakarta Barat		Pemeliharaan Alat Berat dan kelengkapannya		1.050.000.000	
4	Sudin Tata Air Jakarta Barat		Pemeliharaan Reverse Osmosis (RO) di Wilayah Jakarta Barat		5.615.678	
4	Sudin Tata Air Jakarta Barat		Pengadaan Pompa dan Kelengkapannya		13.442.103.416	
4	Sudin Tata Air Jakarta Barat		Perbaikan Infrastruktur Saluran, Saluran Penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Jakarta Barat	10.649.574.536	-	
4	Sudin Tata Air Jakarta Barat		Penilaian Teknis Kelayakan IPAL dan Pengendalian Kinerja Sarana dan Prasarana Air Limbah		70.849.258	
4	Sudin Tata Air Jakarta Selatan		Pemeliharaan Alat-Alat Berat beserta kelengkapannya	362.636.280	-	
4	Sudin Tata Air Jakarta Selatan		Pembangunan Saluran, Saluran Penghubung dan kelengkapannya		25.249.955.573	
4	Sudin Tata Air Jakarta Selatan		Pembangunan Pagar Pembatas Kali		4.604.080.749	
4	Sudin Tata Air Jakarta Selatan		Pembangunan Pompa Sistem Polder dan Kelengkapannya		12.573.398.698	
4	Sudin Tata Air Jakarta Selatan		Perbaikan Infrastruktur Saluran/Saluran PHB di Kota Adm Jakarta Selatan		7.033.100.108	
4	Sudin Tata Air Jakarta Selatan		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah		2.401.619.660	
4	Sudin Tata Air Jakarta Selatan		Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	1.067.194.220	-	
4	Sudin Tata Air Jakarta Timur		Pemeliharaan Alat-Alat Berat beserta kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur		81.784.560	
4	Sudin Tata Air Jakarta Timur		Pembangunan Saluran, Saluran Penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur		704.180.000	

NO	KOMISI	URAIAN	KEGIATAN	KELUAR POT	MASUK POT	KETERANGAN
	4	Sudin Tata Air Jakarta Timur	Pemeliharaan Sumur resapan, Imbuhan dan Pengisian (Recharge) Air Tanah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur		3.090.702	
	4	Sudin Tata Air Jakarta Timur	Perbaikan Infrastruktur Waduk/Situ/Embung di Kota Administrasi Jakarta Timur		510.576.790	
	4	Sudin Tata Air Jakarta Timur	Perbaikan Infrastruktur Saluran/Saluran PHB di Kota Adm Jakarta Timur		12.310.799.686	
	4	Sudin Tata Air Jakarta Timur	Pengelolaan Pompa Stasioner, Pompa Mobile, Pintu Air, Bangunan Rumah Pompa serta Rumah Jaga dan Kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur	12.310.799.686	-	
	4	Sudin Tata Air Jakarta Timur	Pembangunan sistem pengelolaan air limbah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur		2.688.344.460	
	4	Sudin Tata Air Jakarta Timur	Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor	704.180.000	-	
	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Penyajian Data Dan Konsolidasi Data Hasil Registrasi Orang Asing Pemegang ITAS Dan ITAP Dengan Kantor Imigrasi Di 5 Kota Administrasi	149.381.768		
	1	Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil - JAKPUS	Penyediaan pekerja kontrak pelayanan Dukcapil sudin kependudukan dan pencatatan sipil kota administrasi jakarta pusat	1.216.908.822		
	1	Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil - JAKUT	Penyediaan Pekerja Kontrak Pelayanan Administrasi Kependudukan Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kab Administrasi Jakarta Utara	323.246.254		
	1	Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil - JAKBAR	Penyediaan Pekerja Kontrak Pelayanan Administrasi Kependudukan Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kab Administrasi Jakarta Barat	556.042.476		
	1	Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil - JAKSEL	Penyediaan Pekerja Kontrak Pelayanan Administrasi Kependudukan Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kab Administrasi Jakarta Selatan	1.393.194.012		
	1	Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil - JAKTIM	Penyediaan Pekerja Kontrak Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur	1.337.686.032		
	1	Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil - Kep.Seribu	Penyediaan Pekerja Kontrak Pelayanan Administrasi Kependudukan Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	41.738.472		
	1	Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan	Penyediaan Pekerja Kontrak Perorangan Dukcapil	147.641.070		
	1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan Forum Pembauran kebangsaan (FPK)	629.220.000	-	
	1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Posko Bersama Pemilihan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017	356.070.000	-	
	1	SEKRETARIAT DPRD	Pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta	991.282.000	-	
	1	SEKRETARIAT DPRD	Pembahasan Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta	1.193.559.000	-	
	1	SEKRETARIAT DPRD	Pembahasan Panitia Khusus dan Kepanitiaan Lainnya	516.330.000	-	
	1	SEKRETARIAT DPRD	Penyelenggaraan Kegiatan Pimpinan Dewan	153.360.000	-	
	1	SEKRETARIAT DPRD	Penyelenggaraan Pertemuan Asosiasi DPRD dan Forkom Sekretaris DPRD Seluruh Indonesia	551.553.000	-	
	1	SEKRETARIAT DPRD	Penyelarasan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	516.922.000	-	
	1	SEKRETARIAT DPRD	Pembahasan Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta	914.646.000	-	
	1	SEKRETARIAT DPRD	Pengelolaan Persidangan Paripurna	-	231.037.500	
	1	SEKRETARIAT DPRD	Pembahasan Badan Kehormatan DPRD Provinsi DKI Jakarta	175.522.000	-	
	1	SEKRETARIAT DPRD	Kunjungan Kerja Sister City DPRD Provinsi DKI Jakarta	303.842.500	-	
	1	SEKRETARIAT DPRD	Kunjungan Kerja Komisi-Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta	2.789.088.000	-	
	1	SEKRETARIAT DPRD	Penyediaan Alat Tulis Kantor	23.518.880	-	

NO	KOMISI	URAIAN	KEGIATAN	KEBUARIPOT	MASUKIPOT	KETERANGAN
1	SEKRETARIAT DPRD	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)		127.236.450	-	
1	SEKRETARIAT DPRD	Pemeliharaan Jaringan Internet Gedung DPRD		47.187.800	-	
1	SEKRETARIAT DPRD	Penyediaan Jasa Bidang Teknisi / Administrasi		659.170.220	-	
1	SEKRETARIAT DPRD	Pemeliharaan CCTV Gedung DPRD		117.004.800	-	
1	SEKRETARIAT DPRD	Pemeliharaan Instalasi Listrik, Telephone, Sound System Gedung DPRD Blok H		-	73.998.672	
1	SEKRETARIAT DPRD	Pemeliharaan Instalasi Listrik, Telephone, Sound System Gedung DPRD		-	94.227.540	
1	SEKRETARIAT DPRD	Pengadaan Plakat / Penghargaan		604.230.000	-	
1	SEKRETARIAT DPRD	Pemeliharaan Travo, Panel Listrik, dan Genset Gedung DPRD		84.700.000	-	
1	SEKRETARIAT DPRD	Pemeliharaan Travo, Panel Listrik dan Genset Gedung DPRD Blok H		88.000.000	-	
1	SEKRETARIAT DPRD	Pemeliharaan CCTV Gedung DPRD Blok H		161.220.400	-	
1	SEKRETARIAT DPRD	Penggantian Komponen Mekanikal Elektrikal		124.992.670	-	
1	SEKRETARIAT DPRD	Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		40.480.000	-	
1	SEKRETARIAT DPRD	Perbaikan Sipil Gedung DPRD		499.637.891	-	
1	SEKRETARIAT DPRD	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kantor		467.840.544	-	
1	SEKRETARIAT DPRD	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus		2.482.385.040	-	
1	SEKRETARIAT DPRD	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor		-	129.623.040	
1	SEKRETARIAT DPRD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		7.700.000	-	
1	SEKRETARIAT DPRD	Penyediaan Makanan dan Minuman		5.111.641.000	-	
1	SEKRETARIAT DPRD	Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kerja		753.022.710	-	
1	SEKRETARIAT DPRD	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus		23.056.000	-	
1	SEKRETARIAT DPRD	Pemeliharaan ME Rumah Dinas		176.330.000	-	
1	SEKRETARIAT DPRD	Pemeliharaan KDO/ KDO Khusus		900.900.000	-	
1	SEKRETARIAT DPRD	Penyediaan Perlengkapan Dokumentasi		-	13.721.400	
1	SEKRETARIAT DPRD	Pencetakan dan Pengiriman Majalah Legislatif Jaya		39.208.800	-	
1	SEKRETARIAT DPRD	Pengelolaan Website DPRD Provinsi DKI Jakarta		6.900.000	-	
1	SEKRETARIAT DPRD	Pencetakan buku agenda, buku saku, kalender dinding, kalender duduk DPRD Provinsi DKI Jakarta		8.085.000	-	
1	SEKRETARIAT DPRD	Pengadaan Buku Perpustakaan Sekretariat DPRD		-	41.250.000	
1	BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI	Pengelolaan Administrasi dan Kerumahtanggaan Pimpinan Daerah		930.000.000	-	
1	BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI	Penyediaan Sarana dan Perlengkapan Kebutuhan Kepala Daerah		350.412.000	-	
1	SATPOL PP	Diklat Pembentukan Pol PP Tingkat Dasar Pola 150 jam		269.205.853	-	
1	SATPOL PP	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		30.192.525	-	
1	SATPOL PP	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus		120.000	-	
1	SATPOL PP	Penyediaan Makanan dan Minuman		58.280.000	-	
1	SATPOL PP	Penyediaan Alat Pendukung Pelaksanaan Penerbitan		2.669.640.200	-	
1	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya		1.653.884.100	-	
1	INSPEKTORAT	Peningkatan Kinerja dan Kualitas Tugas-tugas Pengawasan		500.000.000	-	
1	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Diklat Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual		154.881.000	315.000.000	
1	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Diklat Manajemen Perencanaan dan Pembangunan Daerah		123.169.000	315.000.000	
1	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Diklat Pengelolaan Penatausahaan Keuangan		-	66.000.000	
1	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Diklat Manajemen Sekolah		227.517.000	405.000.000	
1	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pengiriman Pegawai Tugas Belajar		975.950.000	-	
1	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Diklat Pengelolaan Barang Daerah		126.678.000	300.000.000	
1	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Diklat Bendahara Pengeluaran		238.191.000	315.000.000	
1	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Diklat Teknis Training of Fasilitator		140.135.000	255.000.000	
1	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Diklat Pengawas Sekolah		133.917.000	405.000.000	
1	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pengiriman Kediklatan		99.783.000	-	
1	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Diklat Teknis Perundang-Undangan		94.493.000	255.000.000	
1	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pengelolaan Website dan Pengembangan Sistem Informasi Kediklatan		74.250.000	75.500.000	

NO	KOMISI	URAIAN	KEGIATAN	KELUAR POT	MASUK POT	KETERANGAN
1	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Sertifikasi profesi	49.591.500	49.595.000	
1	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		Pengadaan Barang Pakai Habis Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	18.972.525	-	
1	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		Pengadaan Modal Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	71.781.000	15.840.000	
1	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		Pengadaan Alat Tulis Penyelenggaraan Diklat	68.952.400	-	
1	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		Penyediaan Makanan dan Minuman	31.514.075	-	
1	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	142.026.500	-	
1	Kota Administrasi Jakarta Pusat		Rehab Total Kantor Lurah Gambir Jakarta Pusat	-	-	
1	Kota Administrasi Jakarta Pusat		Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor	765.849.320	-	
1	Kota Administrasi Jakarta Pusat		Pengadaan Lift Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat (Khusus Gedung Lama)	-	1.162.965.243	
1	Kelurahan Kebon Melati - JAKPUS		Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)	-	320.894.344	
1	Kelurahan Kapuk Muara - JAKUT		Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) RPTRA Kelurahan Kapuk Muara	-	470.943.421	
1	Kelurahan Pluit - JAKUT		Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)	-	359.022.108	
1	Kelurahan Pademangan Barat - JAKUT		Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)	-	389.619.976	
1	Kelurahan Kelapa Gading Timur - JAKUT		Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) RW 010 dan RW 015	-	653.853.436	
1	Kota Administrasi Jakarta Barat		Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan	93.138.000	-	
1	Kota Administrasi Jakarta Barat		Penyelenggaraan Pelayanan Tamu dan Jamuan Resmi	57.600.000	-	
1	Kota Administrasi Jakarta Barat		Rehab Kantor Lurah Kelurahan Tangki	500.000.000	-	
1	Kota Administrasi Jakarta Barat		Rehab Kantor Lurah Kelurahan Glodok	500.000.000	-	
1	Kota Administrasi Jakarta Barat		Rehab Kantor Lurah Kelurahan Duri Utara	500.000.000	-	
1	Kota Administrasi Jakarta Barat		Rehab Kantor Lurah Kelurahan Pinangsia	500.000.000	-	
1	Kota Administrasi Jakarta Barat		Rehab Kantor Lurah Kelurahan Taman Sari	500.000.000	-	
1	Kota Administrasi Jakarta Barat		Pemeliharaan lift Kantor Walikota Kota Adm. Jakarta Barat	282.649.700	-	
1	Kota Administrasi Jakarta Barat		Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	13.401.700	-	
1	Kota Administrasi Jakarta Barat		Pemeliharaan Rumah Dinas Walikota Kota Adm. Jakarta Barat	184.611.606	-	
1	Kelurahan Angke - JAKBAR		Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)	-	278.166.978	
1	Kelurahan Tangki - JAKBAR		Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	58.653.000	-	
1	Kota Administrasi Jakarta Selatan		Rehab Total Rumah Dinas Camat Cilandak	1.294.388.136	-	
1	Kota Administrasi Jakarta Selatan		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.900.650	-	
1	Kota Administrasi Jakarta Selatan		Penyediaan peralatan rumah tangga	8.250.000	-	
1	Kota Administrasi Jakarta Selatan		Pemeliharaan AC kantor Walikota	-	204.523.880	
1	Kota Administrasi Jakarta Selatan		Pemeliharaan Lift	333.552.899	-	
1	Kota Administrasi Jakarta Selatan		Pemeliharaan Instalasi ME Kantor Walikota Jakarta Selatan	-	292.600.000	
1	Kota Administrasi Jakarta Selatan		Pengadaan AC Chiller	199.868.151	-	
1	Kota Administrasi Jakarta Selatan		Pengadaan Alat Penerangan Gedung kantor Walikota Kota Adm Jakarta Selatan	-	144.223.046	
1	Kota Administrasi Jakarta Selatan		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.168.145.979	-	
1	Kota Administrasi Jakarta Selatan		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	75.045.621	-	
1	Kelurahan Pondok Pinang - JAKSEL		Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)	-	313.801.588	
1	Kelurahan Pejaten Barat - JAKSEL		Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)	-	352.010.520	
1	Kelurahan Cipadak - JAKSEL		Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)	-	366.736.386	
1	Kelurahan Mampang Prapatan - JAKSEL		Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)	-	-	
1	Kelurahan Mampang Prapatan - JAKSEL		Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)	-	255.616.080	
1	Kota Administrasi Jakarta Timur		Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dewan Kota	-	37.200.000	
1	Kota Administrasi Jakarta Timur		Rehab Total Kantor Lurah balekambang	7.800.000.000	-	
1	Kota Administrasi Jakarta Timur		Rehab Total Kantor Lurah Jatinegara	7.200.000.000	-	
1	Kota Administrasi Jakarta Timur		Rehab Total Kantor Lurah Kayu Manis	7.400.000.000	-	
1	Kota Administrasi Jakarta Timur		Rehab Total Kantor Lurah Kayu Putih	7.000.000.000	-	

NO.	KOMISI	URAIAN	KEGIATAN	KELUAR POT	MASUK POT	KETERANGAN
1	Kota Administrasi Jakarta Timur	Rehab Total Kantor Lurah Kampung Melayu	8.000.000.000	-		
1	Kota Administrasi Jakarta Timur	Rehab Total Kantor Lurah Balimester	7.600.000.000	-		
1	Kota Administrasi Jakarta Timur	Pemeliharaan AC Kantor Walikota Jakarta Timur	680.471.891	-		
1	Kota Administrasi Jakarta Timur	Pemeliharaan Gedung Kantor Walikota Jakarta Timur	-	486.400.194		
1	Kota Administrasi Jakarta Timur	Penggantian AC Chiller B1, B2 dan D Kantor Walikota Jakarta Timur	-	685.419.790		
1	Kota Administrasi Jakarta Timur	Pemeliharaan Rumah Dinas Walikota Jakarta Timur	360.918.705	-		
1	Kota Administrasi Jakarta Timur	Pemeliharaan KDO/KDO Khusus	112.800.875	-		
1	Kelurahan Kramat Jati - JAKTIM	Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)	-	258.423.288		
1	Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengembangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	340.080.000	-		
1	Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pelaksanaan Penelitian dan Uji Fisik Terhadap Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	-	-		
1	Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pelayanan Publik	-	-		
1	Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penyediaan Jasa dan Peralatan Pendukung Penelitian Teknis	4.525.000.000	-		
1	Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengembangan Call Center dan Komunikasi Masyarakat	-	-		
1	Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	9.013.048.000	-		
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penyediaan Pojok KIE (KOMunikasi, Informasi, dan Edukasi) Penanggulangan Bencana di RPTRA dan bagi Kegiatan Publikasi edukasi Lainnya	112.115.850	-		
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penyediaan Jaringan Komunikasi Penanggulangan Bencana	24.640.000	-		
1	SEKRETARIAT DPRD	Perbaikan Rumah Dinas Ketua DPRD	1.443.275.938	-		
1	SEKRETARIAT DPRD	Rehab Ruang Rapat Alat Kelengkapan Dewan	396.457.261	-		
1	SEKRETARIAT DPRD	Rehab Ruang Outlet Lobby	190.132.176	-		
1	SEKRETARIAT DPRD	Penggantian Lampu Luar Gedung	410.400.293	-		
1	SEKRETARIAT DPRD	Asuransi Kendaraan Dinas Anggota Dewan	860.771.692	-		
1	SEKRETARIAT DPRD	Digitalisasi Arsip Sekretariat DPRD	85.387.500	-		
1	SEKRETARIAT DPRD	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja	19.000.000.000	-		Detil kegiatan pada Bidang Pemerintahan
1	SEKRETARIAT DPRD	Penataan Kolam Gedung	500.000.000	-		
1	SATPOL PP	Penyelenggaraan Apel Gabungan Tiga Pilar (PEMDA, TNI dan POLRI)	1.618.870.000	-		
1	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Petugas Penanganan Penanggulangan Kebakaran	-	-		
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Penyusunan Bezzeting dan Pengembangan Formasi Kebutuhan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	-	28.139.000		
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Seleksi Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dari Luar Pemerintah Dan Antar SKPD	1.208.000	-		
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Seleksi Terbuka Jabatan	86.315.250	-		
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Penyelesaian proses Tenaga Honorer Kategori II dan Guru Bantu di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	-	38.800.000		
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Pemberian Penghargaan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	-	5.400.000		
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Proses Kenaikan Pangkat Terpadu PNS Provinsi DKI Jakarta	-	615.500		
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Pelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan PNS	300.453.500	-		
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Uji Kompetensi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	-	80.438.000		
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai	-	191.840.000		
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Konseling Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	62.410.000	-		
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional	-	2.240.000		
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Supervisi/Monitoring Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)	-	2.380.000		

NO	KOMISI	URAIAN	KEGIATAN	KELUAR POT	MASUK POT	KETERANGAN
	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengangkatan CPNS menjadi PNS serta Sumpah/Janji di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	35.200.000	-	
	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	31.972.000	
	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.105.000	-	
	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.476.794	-	
	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	-	11.880.000	
	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	69.554.596	
	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BKD Provinsi DKI Jakarta	93.425.882	-	
	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Penyediaan Medali Penghargaan Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	-	512.050.000	
	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Website BKD Provinsi DKI Jakarta	-	58.547.000	
	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Disiplin Pegawai	87.650.000	-	
C		Pembiayaan		300.000.000.000	1.230.000.000.000	930.000.000.000
1		Penerimaan				
		SILPA			1.000.000.000.000	
2		Pengeluaran				
		PMD PD PAL Jaya			230.000.000.000	
		PMD PT. PAM Jaya		300.000.000.000		

Jakarta, November 2016

Pimpinan Banggar DPRD Prov DKI Jakarta

TAPD Provinsi DKI Jakarta


H. Ferrial Sofyan

H. Mohamad Taufik

Ir. H. Triwisaksana, M.Sc

H. Lulung AL, SH

Pt. Inspektur

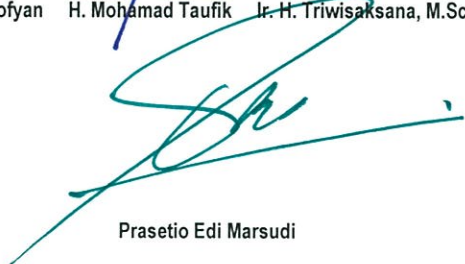

Sri Rahayu W.
NIP 196203081989122001

Kepala BPKAD


Heru Budi Hartono
NIP 196512131993031006

Kepala Bappeda


Tuty Kusumawati
NIP 196304291986032003


Prasetio Edi Marsudi

Sekretaris Daerah

Saefullah

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD	1
1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD	4
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD	5
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2014	7
2.2 Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2015	12
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	16
3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	16
3.2 Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Tahun 2016	17
3.3 Laju Inflasi DKI Jakarta Tahun 2016	18
3.4 Nilai Tukar Tahun 2016	19
3.5 Pertumbuhan PDRB DKI Jakarta	20
3.6 Lain-lain Asumsi	20
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	23
4.1 Pendapatan Daerah	23

4.1.1	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	24
4.1.2	Target Pendapatan Daerah	27
4.1.3	Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah	30
4.2	Belanja Daerah	31
4.2.1	Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja Wajib	31
4.2.2	Kebijakan terkait pemenuhan Belanja Prioritas dalam pencapaian visi dan misi RPJMD	32
4.2.3	Kebijakan terkait pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	33
4.2.4	Kebijakan terkait belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga	33
4.2.5	Kebijakan terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik	34
4.2.6	Kebijakan terkait mengakomodir laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD	35
4.2.7	Kebijakan terkait adanya Peraturan yang ditetapkan pasca disampaikannya Rancangan KUA PPAS APBD Tahun 2017	35
4.2.8	Kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016 yang gagal dilaksanan sehingga menjadi prioritas pada tahun 2017	35
4.2.9	Kebijakan lainnya	36
4.3	Pembiayaan Daerah	36
4.3.1	Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan	36
4.3.2	Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah	36
4.4	Ringkasan RAPBD 2016	37
BAB V PENUTUP		41

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I.1. Bagan Proses Penyusunan KUA 2017	4
Gambar II.1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011 – 2015	7
Gambar II.2. Perkembangan Inflasi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2011 – 2015	9
Gambar II.3. Tingkat Pengangguran DKI Jakarta Tahun 2011 - 2015	11
Gambar II.4. Jumlah Penduduk Miskin DKI Jakarta Tahun 2011-2015	12
Gambar III.1. Perkembangan nilai tukar	19

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel II.1.	PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 Tahun 2014-2015 (juta rupiah)	8
Tabel II.2.	Indeks Harga Konsumen Provinsi DKI Jakarta	10
Tabel II.3.	Potensi risiko inflasi 2016	15
Tabel III.1.	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional	17
Tabel III.2.	Asumsi Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Nilai Tukar Tahun 2017	22
Tabel IV.1.	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 per 31 Desember 2015 (audited)	28
Tabel IV.2.	Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017	29
Tabel IV.3.	Ringkasan Struktur RAPBD 2017	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang di dalamnya terdapat penetapan kebijakan serta target pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan daerah dalam APBD merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sangat menentukan kualitas APBD. Oleh karena itu, penyusunan APBD harus dilakukan dengan penuh kesungguhan, kecermatan dan ketelitian tersendiri. Hal ini dimaksudkan agar dokumen APBD yang tersusun dapat realitis, rasional, transparan dan akuntabel sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Salah satu tahapan dalam penyusunan APBD adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan pasal 310 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa "Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 265 ayat (3) dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama". Selain itu, pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pasal 15 ayat (2), menyatakan bahwa "Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara". Hal ini sejalan dengan pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa "Kepala daerah berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), menyusun rancangan kebijakan umum APBD".

Secara substansi dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2017 adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,

belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk tahun 2017. Dengan demikian, maka dokumen KUA tahun 2017 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun anggaran 2017 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2017. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2017 dilakukan melalui proses analisis teknokratik berdasarkan pada :

1. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017;
2. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017’;
3. Penelaahan hasil reses pertama DPRD Provinsi DKI Jakarta yang telah diparipurnakan pada tanggal 29 Mei 2015 dan dikirimkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui surat Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 468/-073.6 tanggal 29 Mei 2015 tentang Penyampaian Rekomendasi Hasil Reses Pertama DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015;
4. Penelaahan hasil reses kedua DPRD Provinsi DKI Jakarta yang telah diparipurnakan pada tanggal 7 Oktober 2015 dan dikirimkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui surat Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1098/-073.6 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Penyampaian Rekomendasi Hasil Reses Kedua DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015;
5. Penelaahan hasil reses ketiga DPRD Provinsi DKI Jakarta yang telah diparipurnakan pada tanggal 31 Desember 2015 dan dikirimkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui surat Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1378/-073.6 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penyampaian Rekomendasi Hasil Reses Ketiga DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015;

6. Penelaahan hasil reses pertama DPRD Provinsi DKI Jakarta yang telah diparipurnakan pada tanggal 13 April 2016 dan dikirimkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui surat Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 329/-073.6 tanggal 14 April 2016 tentang Penyampaian Rekomendasi Hasil Reses Pertama DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016;
7. Selain itu, penyusunan KUA Tahun Anggaran 2017 juga memperhatikan kebijakan perencanaan pembangunan nasional, seperti RPJMN serta RKP Nasional Tahun 2017.

Melalui rangkaian proses penyusunan dimaksud, diharapkan dapat terwujud dokumen KUA Tahun Anggaran 2017 yang implementatif dan akuntabel.

Setelah dokumen KUA Tahun Anggaran 2017 tersusun, sesuai pasal 84 ayat (2) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa "Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh sekretaris daerah selaku ketua TAPD kepada kepala daerah, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni". Selanjutnya, sesuai pasal 87 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, mengamanatkan bahwa "Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya".

Selanjutnya Pasal 87 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, mengamanatkan bahwa " Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan".

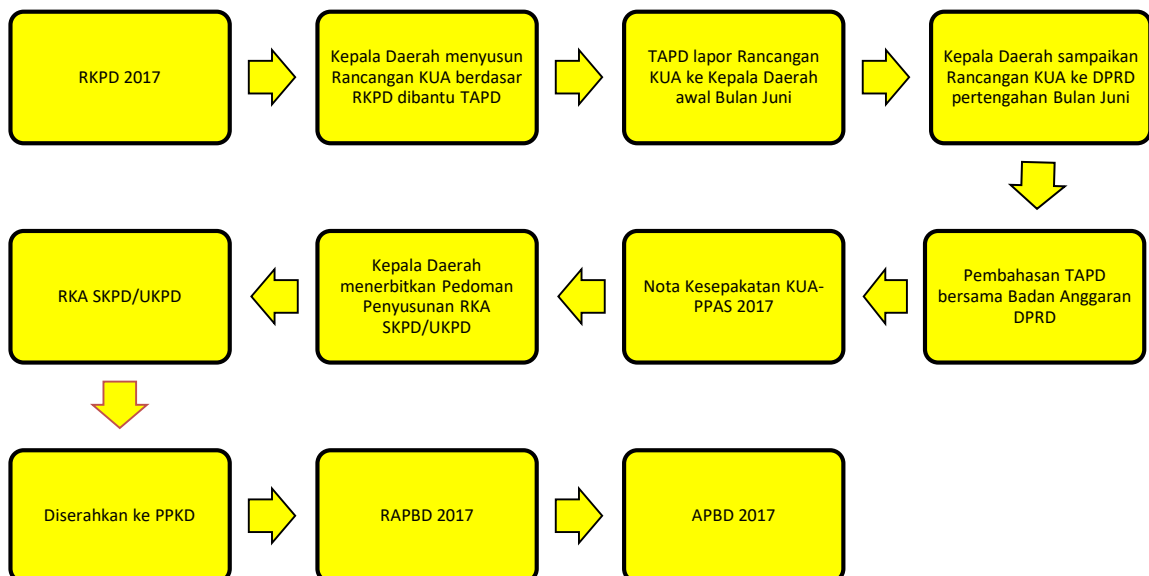
Kemudian menurut Pasal 88 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, menyatakan bahwa "KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) masing-masing

dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan”.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, menyatakan bahwa “Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD”. Dokumen RKA-SKPD/UKPD tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2017.

Selanjutnya Pasal 310 ayat (3) Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa “Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya”. Secara diagramatik alur proses perencanaan dan penganggaran dari KUA sampai dengan APBD dapat di lihat pada gambar berikut :

Gambar I.1. Bagan Proses Penyusunan KUA 2017



Berdasarkan Gambar I.1 di atas, dokumen RKPD Tahun 2017 merupakan dokumen strategis dalam perencanaan pembangunan. Hal ini didasarkan bahwa

dengan dokumen RKPD Tahun 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun KUA Tahun Anggaran 2017 yang kemudian akan dijadikan dasar bagi penyusunan RAPBD Tahun 2017.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2017 bertujuan :

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2017 yang akuntabel yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro lainnya guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan APBD tahun anggaran 2017.
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2017.
3. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2017.
4. Menyusun pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2017 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh SKPD/UKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2017, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2013-2017;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017.

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

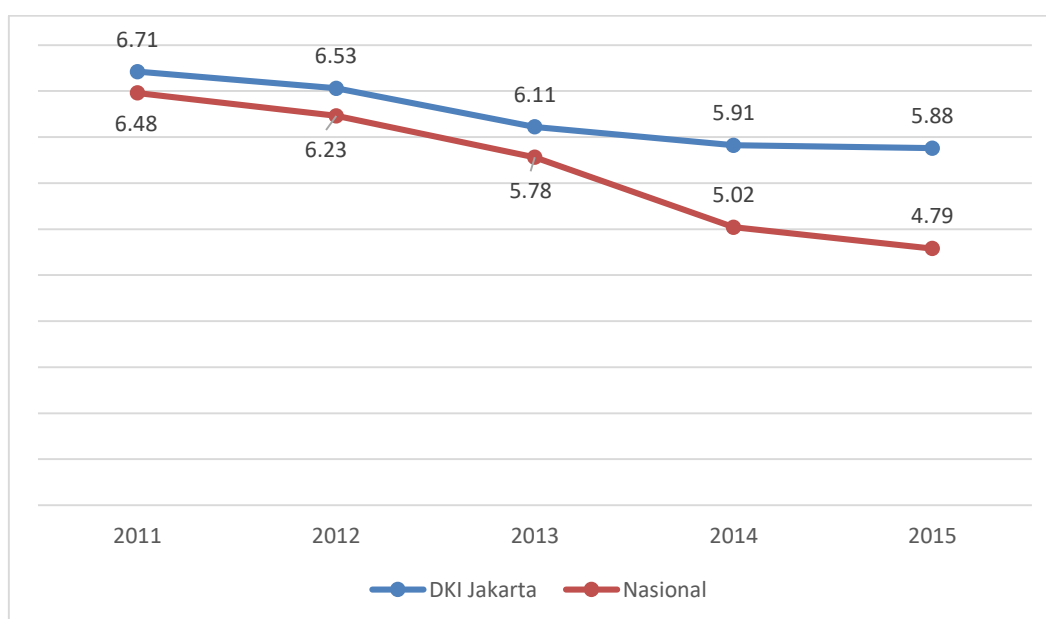
2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2015

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang mantap dan berkualitas akan berpengaruh terhadap pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu, historis pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk dijadikan dasar perencanaan pembangunan daerah.

Bila dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 5,88 persen, melambat dibanding tahun 2014 sebesar 5,91 persen. Namun demikian, angka tersebut masih di atas pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 4,79 persen. Sedangkan perekonomian DKI Jakarta pada Triwulan I tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 5,62 persen bila dibandingkan dengan triwulan I-2015 (y on y).

Berikut adalah perkembangan pertumbuhan ekonomi Nasional dan DKI Jakarta tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 terlihat pada gambar :

Gambar II.1 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011 – 2015



Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, tahun 2016

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar II.1 di atas bahwa laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 2015 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan yang dicapai pada tahun 2014. Hal ini dikarenakan masih melemahnya perekonomian global maupun nasional, yang utamanya disebabkan oleh melemahnya konsumsi rumah tangga, seiring masih melemahnya daya beli masyarakat.

Tabel II.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010
Tahun 2014-2015 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	2014		2015		Laju Pertumbuhan	Distribusi Persentase
	Berlaku	Konstan	Berlaku	Konstan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 718 712	1 360 073	1 867 185	1 375 396	1.13	0.09
B Pertambangan dan Penggalian	4 540 965	2 976 969	5 032 726	2 950 561	-0.89	0.25
C Industri Pengolahan	239 287 410	177 829 006	274 492 251	186 803 041	5.05	13.84
D Pengadaan Listrik dan Gas	5 591 803	3 754 453	6 027 200	3 770 946	0.44	0.30
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	703 948	631 773	747 858	643 786	1.90	0.04
F Konstruksi	235 090 027	188 294 710	261 073 842	195 741 998	3.96	13.16
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	304 598 489	228 775 732	330 319 573	234 872 712	2.67	16.65
H Transportasi dan Pergudangan	54 853 457	41 779 740	65 120 229	45 535 828	8.99	3.28
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	92 190 044	68 850 215	105 882 374	72 582 234	5.42	5.34
J Informasi dan Komunikasi	128 385 278	128 573 633	141 788 699	141 519 407	10.07	7.15
K Jasa Keuangan dan Asuransi	177 535 929	140 160 373	205 312 754	155 189 393	10.72	10.35
L Real Estate	111 671 973	93 399 192	122 622 359	97 809 806	4.72	6.18
M,N Jasa Perusahaan	122 924 324	98 965 444	141 772 604	106 646 598	7.76	7.15
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	98 084 955	61 594 054	107 011 443	62 319 343	1.18	5.40
P Jasa Pendidikan	92 477 342	66 798 033	109 694 480	71 191 439	6.58	5.53
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	28 886 967	21 775 260	32 931 429	23 429 168	7.60	1.66
R,S, T,U Jasa Lainnya	61 675 629	47 870 886	71 723 521	51 720 453	8.04	3.62
PRODUK DOMESTIK BRUTO	1 760 217 252	1 373 389 547	1 983 420 526	1 454 102 107	5,88	100,00

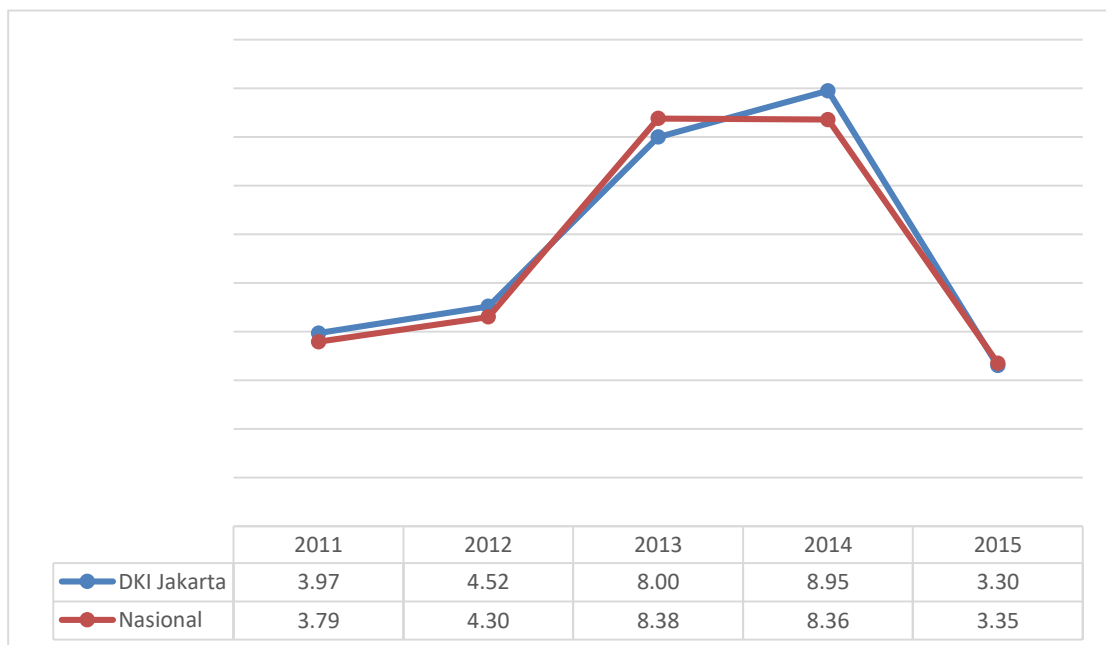
Sumber : BPS DKI Jakarta, tahun 2016

Sebutan Jakarta sebagai Kota Jasa (Service City) tercermin dari struktur perekonomian Jakarta yang diukur dengan PDRB menurut sektoral (lapangan usaha). Berdasarkan data Berita Resmi Statistik Tahun 2016 yang dikeluarkan

oleh BPS Provinsi DKI Jakarta, PBRD DKI Jakarta didominasi oleh 4 (empat) lapangan usaha dengan kontribusi utama yaitu Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,65 persen, Industri Pengolahan sebesar 13,84 persen, Konstruksi 13,16 persen serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 10,358 persen, sebagaimana yang dapat terlihat pada tabel II.1. di atas.

Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi juga merupakan indikator ekonomi makro yang penting. Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Inflasi DKI Jakarta selama tahun 2015 (y on y) mencapai 3,30 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2014 sebesar 8,95 persen. Lebih lanjut perkembangan Inflasi pada tahun 2011 hingga 2015 ditunjukkan pada gambar berikut :

Gambar II.2. Perkembangan Inflasi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2011 – 2015



Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, tahun 2016

Pada Gambar II.2 di atas terlihat bahwa inflasi tahun 2015 merupakan inflasi terendah dalam lima tahun terakhir dan berada di bawah inflasi nasional sebesar 3,35 pesen. Tingkat inflasi diukur dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai indikator. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari

barang dan jasa. Berikut adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai alat ukur tingkat inflasi Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 :

Tabel II.2. Indeks Harga Konsumen Provinsi DKI Jakarta

KETERANGAN	2012	2013	2014	2015
Bahan Makanan				
Indeks	166,34	185,58	131,40	137,79
Perubahan Bulanan (%)	2,22	0,33	3,41	2,77
Perubahan tahun ke tahun (%)	7,43	11,57	12,77	4,86
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau				
Indeks	150,06	164,68	124,68	133,42
Perubahan Bulanan (%)	0,09	1,76	5,01	0,26
Perubahan tahun ke tahun (%)	6,03	9,74	11,92	7,01
Perumahan				
Indeks	127,19	134,44	117,44	121,57
Perubahan Bulanan (%)	-0,01	0,78	1,58	0,49
Perubahan tahun ke tahun (%)	3,66	5,7	8,54	3,52
Sandang				
Indeks	145,29	146,81	107,67	112,97
Perubahan Bulanan (%)	0,72	-0,17	0,57	0,38
Perubahan tahun ke tahun (%)	6,74	1,05	2,92	4,92
Kesehatan				
Indeks	120,13	124,52	109,68	114,89
Perubahan Bulanan (%)	0,08	-0,02	0,14	0,31
Perubahan tahun ke tahun (%)	1,83	3,65	4,78	4,75
Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga				
Indeks	117,45	119,08	104,97	109,18
Perubahan Bulanan (%)	0	0,08	0,55	0
Perubahan tahun ke tahun (%)	0,89	1,39	3,08	4,01
Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan				
Indeks	111,42	127,98	123,74	122,13
Perubahan Bulanan (%)	0,45	1,33	4,25	0,34
Perubahan tahun ke tahun (%)	2,58	14,86	10,53	-1,3
Total				
Indeks	133,58	144,27	119,41	123,35
Perubahan Bulanan (%)	0,56	0,78	2,74	0,72
Perubahan tahun ke tahun (%)	4,52	8,00	8,95	3,30

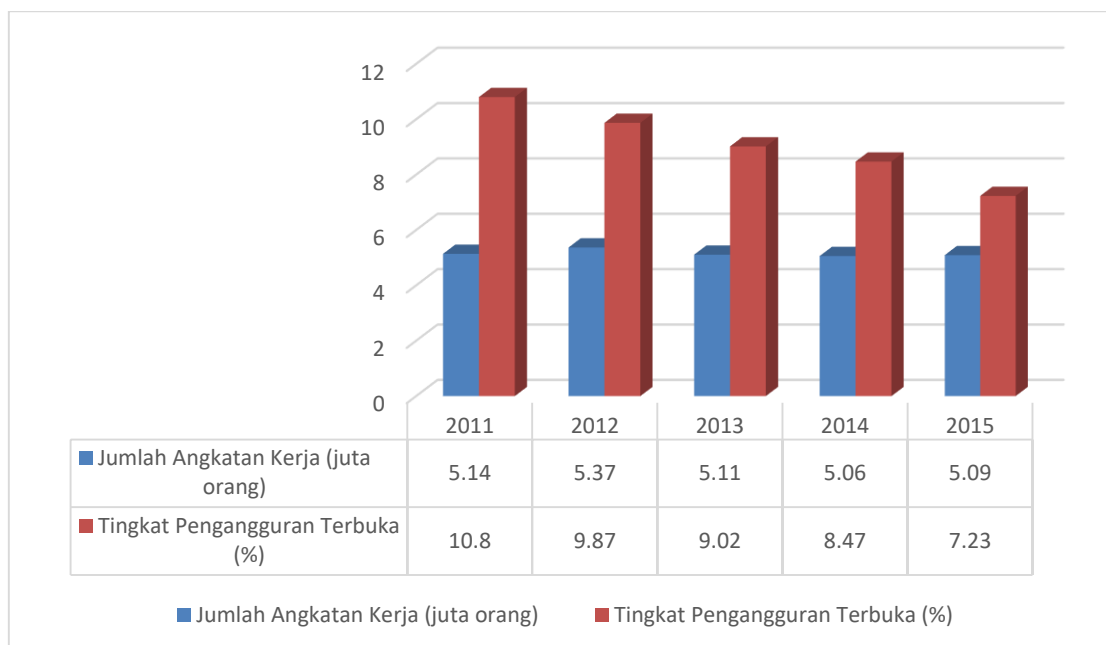
Sumber : Bank Indonesia, tahun 2016

Catatan

- 1) Perubahan bulanan merupakan perbandingan antara indeks bulan yang bersangkutan dengan indeks bulan sebelumnya
- 2) Perubahan tahun ke tahun merupakan perbandingan antara indeks bulan yang bersangkutan dengan indeks bulan yang sama tahun sebelumnya
- 3) Data indeks dan perubahan bulanan (%) untuk periode tahunan adalah angka bulan Desember tahun yang bersangkutan

Kemampuan penyerapan angkatan kerja (penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi) di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kondisi yang cukup baik. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2015 tercatat sejumlah 5,09 juta orang, bertambah sekitar 28,74 ribu orang dibandingkan jumlah angkatan kerja pada Agustus 2014 sebesar 5,06 juta orang (meningkat 0,57 persen). Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi DKI Jakarta pada Agustus 2015 sebesar 7,23 persen, mengalami penurunan 1,24 poin dibandingkan keadaan Agustus 2014 (8,47 persen). Pada Gambar II.3 dapat terlihat bahwa tingkat pengangguran tahun 2015 merupakan tingkat pengangguran terendah dalam lima tahun terakhir.

Gambar II.3. Tingkat Pengangguran DKI Jakarta Tahun 2011 - 2015

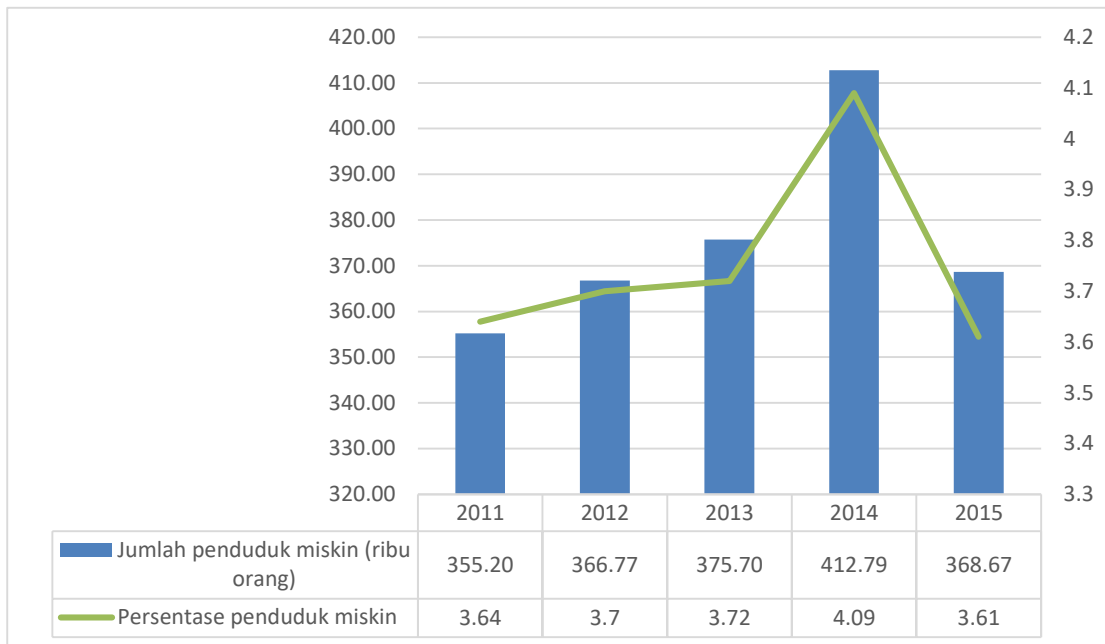


Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, tahun 2016

Tingkat kesejahteraan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 menunjukkan perbaikan dengan kembali turunnya rasio jumlah penduduk miskin. Berdasarkan data kemiskinan yang dikeluarkan BPS DKI Jakarta pada September 2014, jumlah penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 412,79 ribu orang atau 4,09 persen. Selanjutnya pada bulan September 2015 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 44,12 ribu orang (turun sebesar 10,67 persen) sehingga jumlah penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 tercatat sebesar 368,67 ribu orang atau 3,61 persen.

Penurunan rasio penduduk miskin ini dapat dicapai berkat adanya berbagai upaya program sosial yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Persentase penduduk miskin diproyeksi akan mencapai pada kisaran 3,46 - 3,51 persen pada tahun 2016 dan berada pada kisaran 3,40 - 3,50 persen pada tahun 2017. Perbandingan jumlah penduduk miskin pada tahun 2011 hingga tahun 2015 dapat ditunjukkan pada di bawah :

Gambar II.4. Jumlah Penduduk Miskin DKI Jakarta Tahun 2011-2015



Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, tahun 2016

Dengan melihat Gambar II.4. dapat disimpulkan bahwa terdapat perbaikan kondisi kemiskinan di DKI Jakarta pada tahun 2015 sebesar 0,48 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Jika dilihat dari perkembangan indikator ekonomi di atas, dapat disimpulkan bahwa tahun 2015 pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 mengarah pada perbaikan ekonomi.

2.2 Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016

Melihat perkembangan kondisi ekonomi global maupun nasional serta berbagai kebijakan yang akan ditempuh pemerintah, Bank Indonesia memproyeksikan perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2016 diperkirakan tumbuh meningkat mencapai kisaran 6,3 - 6,7 persen (y on y). Angka perkiraan

tersebut berada di atas perkiraan sebelumnya (5,9 - 6,3 persen) terkait realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2015 yang di atas perkiraan dan revisi angka PDRB (sejak tahun 2013) yang semakin meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta.

Proyeksi pertumbuhan perekonomian Jakarta tahun 2016 tersebut ditopang dari peningkatan permintaan domestik. Perbaikan kinerja belanja Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian/lembaga yang ada di Jakarta akan mendorong pertumbuhan permintaan. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh lebih tinggi, seiring meningkatnya optimisme konsumen dan membaiknya daya beli masyarakat, yang akan terdorong pula oleh pelaksanaan Pilkada. Realisasi belanja modal pemerintah dan perbaikan iklim investasi melalui stimulus dan kemudahan usaha dari berbagai paket kebijakan pemerintah akan menjadi pendorong dalam peningkatan investasi. Sementara itu, masih lemahnya pemulihan perekonomian global belum dapat meningkatkan andil kinerja ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta.

Lebih tingginya proyeksi angka pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia didorong oleh beberapa faktor positif diantaranya percepatan realisasi belanja Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, yang ditandai dengan lelang berbagai proyek strategis pada awal tahun 2016. Selain itu, kenaikan UMP, disertai meningkatnya optimisme konsumen, menjadi pendorong membaiknya konsumsi rumah tangga. Perbaikan kinerja juga terjadi pada investasi, ditopang realisasi belanja modal pemerintah. Namun, kinerja ekspor masih terbatas di tengah masih lemahnya pemulihan ekonomi global dan menurunnya harga komoditas. Merespons ekspor yang masih terbatas, impor masih tumbuh negatif.

Membaiknya permintaan domestik berdampak pada membaiknya kinerja lapangan usaha terutama jasa. Kinerja lapangan usaha utama yaitu perdagangan besar dan eceran, informasi dan komunikasi, konstruksi serta lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi diperkirakan tumbuh meningkat pada triwulan I 2016, ditopang oleh membaiknya permintaan domestik. Kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran akan tumbuh lebih tinggi,

didorong oleh membaiknya daya beli masyarakat. Lapangan usaha informasi dan komunikasi diperkirakan masih tumbuh tinggi sejalan dengan masih tingginya permintaan komunikasi data. Kinerja sektor jasa lainnya yaitu jasa transportasi dan pergudangan terutama transportasi udara terindikasi terus meningkat seiring bertambahnya maskapai penerbangan yang beroperasi dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Sementara itu, sektor jasa keuangan diperkirakan tumbuh membaik didukung oleh semakin besarnya ekspansi kredit perbankan dan meningkatnya kinerja pasar modal

Bank Indonesia memproyeksikan inflasi Jakarta pada tahun 2016 diprediksi akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2015, namun tetap terkendali dengan perkiraan sebesar $4,1 \pm 1$ persen (y on y). Peningkatan tekanan inflasi lebih disebabkan oleh faktor domestik, antara lain meningkatnya permintaan masyarakat seiring dengan prospek ekonomi yang membaik, transmisi dampak pelemahan nilai tukar rupiah ke dalam harga barang dan jasa, kenaikan UMP 2016 serta potensi pergeseran masa tanam yang dapat mengganggu kesinambungan pasokan pangan. Dari sisi eksternal, pergerakan nilai tukar yang belum stabil merupakan salah satu sumber potensi risiko yang dapat menyebabkan tekanan inflasi. Berikut tabel berikut adalah potensi risiko inflasi tahun 2016.

Tabel II.3. Potensi risiko inflasi 2016

KELOMPOK	FAKTOR RISIKO TAHUN 2016	POTENSI DAMPAK TERHADAP INFLASI IHK
Volatile Food	a. Pergeseran musim tanam berdampak pada pergeseran panen. Sehingga terdapat potensi pasokan terganggu, terutama pada triwulan I 2016 b. Musim hujan yang sedang berlangsung, berdampak kurang kondusif bagi produksi tanaman hortikultura. Gangguan produksi hortikultura akan mendorong kenaikan harga.	Medium

KELOMPOK	FAKTOR RISIKO TAHUN 2016	POTENSI DAMPAK TERHADAP INFLASI IHK
Administered Prices	<ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan pemerintah mengalihkan pelanggan listrik berdaya 900VA ke 1300VA pada bulan Agustus b. Harga minyak internasional diperkirakan akan cenderung berada di level yang rendah. Sehingga terdapat ruang untuk menurunkan harga BBM (bensin dan solar), yang selanjutnya akan mendorong turunnya tarif angkutan. Selain itu dengan ICP yang juga rendah, maka tarif TTL juga mempunyai peluang untuk diturunkan 	Rendah
Core	<ul style="list-style-type: none"> a. Transmisi dampak pelemahan rupiah tahun terhadap kenaikan biaya produksi tahun 2015 ke 2016 b. Kembali tertekannya rupiah, terkait dengan defisit transaksi berjalan yang meningkat, sejalan dengan impor yang lebih kuat, yang didorong geliat aktivitas ekonomi yang lebih tinggi 	Rendah

Sumber: Bank Indonesia

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

Perekonomian DKI Jakarta mencerminkan perekonomian nasional sehingga pergerakan yang terjadi pada perekonomian DKI Jakarta akan mempengaruhi perekonomian nasional. Hal ini juga mempunyai pengertian bahwa perekonomian DKI Jakarta juga mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional. Namun Jakarta sebagai bagian dari kota-kota besar dunia, perekonomiannya sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global.

Berdasarkan kondisi riil perekonomian DKI Jakarta tahun 2015 dan proyeksi tahun 2016, maka prospek perekonomian tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut.

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Pada tahun 2017, pertumbuhan perekonomian diperkirakan akan kembali meningkat. Peningkatan tersebut seiring dengan terjaganya laju pertumbuhan perekonomian global dan membaiknya harga komoditas internasional. Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan masih ditopang oleh pertumbuhan positif permintaan domestik. Dari sisi permintaan domestik, pembangunan infrastruktur diperkirakan akan tetap menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi di tengah masih terbatasnya pertumbuhan global.

Pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2017 diperkirakan akan mencapai 6,0 – 7,2 persen. Laju inflasi diperkirakan berada pada kisaran 3,0 - 5,0 persen dan nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak pada kisaran Rp.13.300 – Rp.13.700 per dolar AS. Berikut tabel asumsi dasar ekonomi makro nasional :

Tabel III.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional

INDIKATOR	2016*	2017**
Pertumbuhan Ekonomi (% , y on y)	5,3	6,0 – 7,2
Inflasi (% , y on y)	4,7	3,0 – 5,0
Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	5,5	4,0 – 6,0
Nilai tukar (Rp/US\$)	13.900	13.300 – 13.700

Sumber :

*) Asumsi dasar ekonomi makro APBN 2016, Kementerian Keuangan

***) Dokumen Nota Keuangan beserta APBN Tahun Anggaran 2016, Kementerian Keuangan

3.2 Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Tahun 2017

Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Indikator-indikator lain yang tak kalah penting antara lain inflasi, kemiskinan, investasi, nilai tukar, dan lain-lain.

Berdasarkan pantauan terhadap berbagai faktor baik kondisi ekonomi global maupun nasional serta berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah, Pada tahun 2017, Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta berada pada kisaran 6,4 - 6,8 persen (y on y). Kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta diperkirakan berasal dari wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, mengingat perekonomian di kedua wilayah tersebut didorong oleh sektor tersier yang merupakan sektor dominan dalam perekonomian Jakarta. Setelah wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, kontribusi terbesar berikutnya diperkirakan berasal dari Kota Jakarta Utara yang perekonomiannya didominasi oleh kinerja sektor industri pengolahan yang cukup baik di wilayah tersebut, terutama industri kendaraan bermotor.

Namun demikian, impor diprediksi juga turut meningkat terkait dengan masih besarnya ketergantungan pada bahan baku luar negeri dari industri

manufaktur. Oleh karena itu, untuk masa yang akan datang impor Jakarta harus dikendalikan secara sistematis dan proporsional agar kinerja perekonomian tetap kondusif bagi para pelaku usaha. Untuk itu, para pemangku kepentingan pembangunan Jakarta perlu memperhatikan dan bekerja sama untuk memperbaiki kinerja perekonomian DKI Jakarta.

Selain itu, dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 2017 diperkirakan sangat dipengaruhi oleh kinerja investasi. Semakin tinggi investasi akan mendorong bekerjanya perekonomian Jakarta semakin baik, hal yang perlu diperhatikan adalah kualitas investasi tersebut.

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, seluruh pemangku kepentingan pembangunan DKI Jakarta harus bekerja sama agar perekonomian DKI Jakarta dapat menunjukkan kinerja yang prima dalam rangka untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Jakarta.

3.3 Laju Inflasi DKI Jakarta Tahun 2017

Inflasi merupakan indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Fluktuasi inflasi daerah akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penentuan asumsi indikator inflasi merupakan langkah strategis dan penting.

Pada Tahun 2017, Bank Indonesia memprediksi inflasi Jakarta diproyeksi pada kisaran $4,0 \pm 1$ persen, sedikit di bawah prediksi inflasi tahun 2016 yang berkisar $4,1 \pm 1$ persen. Penurunan inflasi Jakarta perlu diantisipasi dengan langkah-langkah tepat guna menjamin ketahanan pangan dengan dukungan ketersediaan pasokan dan terjaganya ekspektasi. Selanjutnya perlu adanya upaya untuk mengatasi defisit pangan sehubungan relatif kuatnya permintaan masyarakat *urban*, khususnya kelas menengah yang perlu ditopang dengan meningkatkan pengawasan terhadap harga pokok disamping dengan menggalakkan program remunerasi Pegawai Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa penyesuaian penghasilan. Peran aktif dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) juga perlu ditingkatkan guna meminimalkan gejala inflasi.

3.4 Nilai Tukar Tahun 2017

Selain pertumbuhan ekonomi dan inflasi, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar juga merupakan indikator penting bagi perekonomian DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan DKI Jakarta merupakan bagian dari kota-kota besar dunia yang tidak bisa terlepas dari dinamika perekonomian global. Tren penguatan dolar terhadap hampir seluruh mata uang dunia dipicu tren perekonomian AS yang tumbuh solid dengan perkiraan adanya kenaikan suku bunga bank sentral Amerika The Fed yang turut membuat pelaku pasar terus berspekulasi terhadap imbas hasil dolar. Dari awal tahun 2015 hingga pertengahan bulan Mei tahun 2016, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika berada pada kisaran Rp.12.444 – Rp.14.728 per Dollar Amerika. Selanjutnya Gambar III.1. menjelaskan tentang fluktuasi nilai tukar tersebut :

Gambar III.1. Perkembangan nilai tukar



Sumber : Bank Indonesia, tahun 2016

Mengacu pada dokumen Nota Keuangan beserta APBN Tahun Anggaran 2016, Kementerian Keuangan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat selama periode 2017 hingga 2018 diperkirakan bergerak pada kisaran Rp.13.300 hingga Rp. 13.800 per dolar Amerika Serikat. Dalam hal indikator nilai tukar Rupiah terhadap Dollar, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengikuti kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat.

3.5 Pertumbuhan PDRB DKI Jakarta

Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi pada suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu. PDRB dapat dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu dari sisi produksi, pengeluaran dan pendapatan.

Meskipun diperkirakan tumbuh membaik, terdapat beberapa risiko yang dapat memengaruhi pertumbuhan PDRB DKI Jakarta. Dari sisi global, ketidakpastian di pasar keuangan kembali terjadi seiring rencana kenaikan Fed Fund Rate (FFR) secara gradual. Harga komoditas masih berada dalam tren yang menurun, seiring masih terbatasnya pemulihan perekonomian global. Selain itu, kinerja ekonomi Tiongkok, yang merupakan salah satu negara mitra dagang utama terus mengalami penurunan. Sementara itu, dari sisi domestik, risiko bersumber dari berlanjutnya gelombang PHK.

3.6 Lain-lain Asumsi

1. Belanja wajib mengikat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

2. Belanja yang memenuhi kriteria Darurat adalah sebagai berikut :

- Bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah dan
 - Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat
3. Belanja yang memenuhi kriteria mendesak adalah sebagai berikut :
 - Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
 4. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (SPM), 18 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar dan 8 Urusan Pemerintahan Pilihan.
 5. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, alokasi anggaran fungsi pendidikan diupayakan sekurang – kurangnya 20 persen dari belanja daerah, termasuk dana Bantuan Operasional Pendidikan dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).
 6. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, alokasi anggaran kesehatan sekurang – kurangnya 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di antaranya untuk Pembiayaan Premi Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) Daerah .
 7. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 8. Stabilitas ketentraman dan keamanan dapat terkendali dan terkelola dengan baik sehingga aktifitas sosial ekonomi dapat berjalan dengan baik.

Asumsi dasar ekonomi makro dalam KUA Tahun Anggaran 2017 yang meliputi tiga indikator utama, yakni Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika, secara ringkas dapat dilihat pada Tabel III.2 berikut :

Tabel III.2. Asumsi Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Nilai Tukar Tahun 2017

NO.	VARIABEL	APBD 2016	RAPBD 2017
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)		
	DKI*	6,3 – 6,7	6,4 – 6,8
	Nasional**	5,3	6,0 – 7,2
2	Inflasi (%)		
	DKI*	4,1 ± 1	4,0 ± 1
	Nasional**	4,7	3,0 – 5,0
3	Nilai tukar (Rp/USD)		
	DKI/Nasional**	13.900	13.300 – 13.700

Sumber* : Proyeksi Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2015

Sumber ** : Asumsi dasar ekonomi makro APBN 2016 dan Dokumen Nota Keuangan beserta APBN Tahun Anggaran 2016, Kementerian Keuangan

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, serta Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

4.1 Pendapatan Daerah

Salah satu sumber utama penerimaan kas daerah adalah pendapatan daerah. Pendapatan daerah harus dioptimalkan untuk menghasilkan kapasitas keuangan daerah yang makin tinggi guna mendukung pendanaan pembangunan daerah. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD, meliputi: Pendapatan pajak daerah, Pendapatan retribusi daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah, sedangkan Dana perimbangan, terdiri dari: Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber daya Alam), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Lain-lain Pendapatan yang sah, meliputi: dana hibah, dana darurat, bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, serta dana penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Selanjutnya dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD. Adapun arah kebijakan pendapatan daerah meliputi:

- a. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, dengan meningkatkan optimalisasi sumber-

sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan.

b. Uraian arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah.

c. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

1. Pajak Daerah

a) Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah

- Melakukan perluasan pembayaran pajak melalui bank (multikanal) dan tempat lainnya.
- Melakukan penambahan gerai pajak, gerai samsat, samsat keliling dan drive thru dalam rangka mempermudah pembayaran pajak daerah.
- Melakukan sosialisasi terhadap berbagai kebijakan-kebijakan terbaru.

b) Peningkatan *Law Enforcement*

- Memaksimalkan kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah.
- Meningkatkan kerjasama dengan Kejati dalam hal penagihan piutang pajak daerah.

c) Intensifikasi Pajak Daerah

- Optimalisasi online sistem terhadap 4 (empat) jenis pajak daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
- Membangun sistem informasi pajak daerah terkonsolidasi.
- Melakukan pemutakhiran data subjek dan objek PBB-P2.
- Memberlakukan data berbasis NIK dan KK dalam rangka meningkatkan akurasi tarif progresif guna meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.
- Melakukan kerjasama dengan Kementerian ESDM untuk mendapatkan data kuota BBM para perusahaan penyalur BBM dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB-KB.

- Melakukan koordinasi dengan Ditjen Perimbangan Keuangan dalam rangka optimalisasi dan percepatan penerimaan pajak rokok
- Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah dan Stakeholder yang terkait dengan penentuan potensi dan pemungutan pajak daerah
- Membangun sistem terintegrasi antara Pemprov DKI, BPN, PPAT, dan Bank dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB secara online
- Peningkatan kualitas pelayanan seluruh jenis pajak daerah
- Melakukan pendataan, penyisiran dan pemeriksaan terhadap objek atau subjek pajak daerah
- Melakukan cleansing data piutang pajak daerah

d) Ekstensifikasi Pajak Daerah

- Optimalisasi penerapan penyesuaian tarif Pajak Parkir yang sebelumnya 20% direncanakan menjadi 30%
- Melakukan perluasan basis Pajak Daerah:
 - 1) Revisi perijinan hotel dan restoran yang menjalankan aktifitas hiburan untuk diperluas menjadi objek pajak hiburan
 - 2) Reklasifikasi aktifitas tempat wisata dan rekreasi keluarga yang dikelola oleh swasta dan BUMD menjadi klasifikasi jenis hiburan sehingga dapat dijadikan sebagai objek pajak hiburan
 - 3) Optimalisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendorong pengalihan penyelenggaraan jenis reklame papan menjadi jenis reklame LED
 - 4) Penyesuaian NJOP PBB pada zona komersial mendekati harga pasar
 - 5) Optimalisasi pengenaan pajak restoran terhadap jenis usaha restoran dengan peredaran usaha diatas Rp.200 juta/tahun

- 6) Melakukan perubahan dasar pengenaan pajak reklame dan penyesuaian tarif Kelas Jalan

2. Retribusi Daerah

a) Peningkatan Pelayanan Retribusi Daerah

- Penerapan e-Retribusi dalam pemungutan Retribusi Daerah.
- Menerapkan Banking System dalam melakukan pembayaran Retribusi.
- Memaksimalkan dan menyempurnakan pelayanan Retribusi Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan melalui Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP).

b) Peningkatan *Law Enforcement*

- Menerapkan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.
- Membuat perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Perbankan dalam rangka pembayaran retribusi Daerah.
- Menegakkan peraturan-peraturan pemerintah daerah seperti penertiban parkir liar dan kios-kios penunggak pembayaran retribusi daerah.

c) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah

- Melakukan penyesuaian tarif beberapa jenis retribusi Daerah.
- Melakukan pembaharuan sistem pelayanan dan pembayaran Retribusi UKM.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

- a) Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD.

- b) Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan.
- c) Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui Penyertaan Modal Daerah (PMD), dan lain-lain.
- d) Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan Pihak Ketiga.
- e) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- f) Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui *Debt Management*.

4. Kebijakan Dana Perimbangan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan melalui Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (sumber daya alam).

Selain itu, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 905/501/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, yang mengamanatkan bahwa Semula Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.

5. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Melakukan koordinasi untuk pencairan Hibah MRT sesuai perjanjian perubahan (amandemen) terhadap Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) dan Hibah PT. Jasa Raharja (Persero).

4.1.2 Target Pendapatan Daerah

Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 didasarkan pada realisasi 2015 dan kebijakan pendapatan daerah 2017. Dari rencana Pendapatan

Daerah pada APBD tahun 2015 sebesar Rp.56.309.238.000.000, sampai dengan 31 Desember 2015 telah dapat direalisasikan sebesar Rp.44.209.238.168.583 atau 78,51 persen, sebagaimana pada Tabel IV.1 berikut :

Tabel IV.1. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 per 31 Desember 2015 (audited)

NO	URAIAN	2015		
		APBD	REALISASI (31 DESEMBER 2015/ AUDITED)	% REALI SASI
I	PENDAPATAN	56.309.238.000.000	44.209.238.168.583	78,51
A.	Pendapatan Asli Daerah	37.965.616.304.000	33.686.176.815.708	88,73
	● Pajak Daerah	32.581.650.000.000	29.076.926.598.506	89,24
	- PKB	6.050.000.000.000	6.090.200.500.774	100,66
	- BBN-KB	4.600.000.000.000	4.685.403.450.610	101,86
	- PBB-KB	1.350.000.000.000	1.232.836.931.554	91,32
	- Pajak Hotel	1.500.000.000.000	1.276.285.658.514	85,09
	- Pajak Restoran	2.100.000.000.000	2.290.255.418.530	109,06
	- Pajak Hiburan	550.000.000.000	608.799.682.079	110,69
	- Pajak Reklame	1.800.000.000.000	714.967.327.356	39,72
	- PPJ	710.000.000.000	729.884.587.778	102,80
	- Pajak Air Tanah	95.000.000.000	105.115.871.134	110,65
	- Pajak Parkir	425.000.000.000	450.941.851.356	106,10
	- BPHTB	5.881.650.000.000	3.609.336.161.480	61,37
	- PBB	7.100.000.000.000	6.807.840.609.166	95,89
	- Pajak Rokok	420.000.000.000	475.058.548.175	113,11
	● Retribusi Daerah	610.000.000.000	459.459.498.063	75,32
	- Retribusi Jasa Umum	184.302.327.300	90.398.166.389	49,05
	- Retribusi Jasa Usaha	80.197.672.700	93.304.141.810	116,34
	- Retribusi Jasa Perizinan Tertentu	345.500.000.000	275.757.189.864	79,81
	● Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	640.000.000.000	527.280.486.037	82,39
	● Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	4.133.966.304.000	3.622.510.233.102	87,63
B.	Dana Perimbangan	12.995.465.925.000	5.887.267.644.697	45,30
	● Dana Bagi Hasil	12.995.465.925.000	5.887.267.644.697	45,30
	- Dana Bagi Hasil Pajak	12.894.962.912.000	5.751.741.852.400	44,60
	~ PBB*	179.671.350.000	135.610.649.500	75,48
	~ PPH	12.715.291.562.000	5.616.131.202.900	44,17
	- Bagi Hasil Bukan Pajak	100.503.013.000	135.525.792.297	134,85
C.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.348.155.771.000	4.635.793.708.178	86,68
	● Pendapatan Hibah	2.588.642.100.000	1.880.682.954.789	72,65
	● Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	2.759.513.671.000	2.755.110.753.389	99,84

Sumber : BPKAD Provinsi DKI Jakarta. 2015

Berdasarkan proyeksi kondisi perekonomian tahun 2016 dan 2017 serta realisasi pendapatan daerah sampai 31 Desember 2015 maka rencana Pendapatan Daerah tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp.60.899.636.291.554 atau naik 3,21 persen terhadap Penetapan 2016 sebesar Rp.59.004.784.464.142. Secara lebih rinci, target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat dalam Tabel IV.2 berikut :

Tabel IV.2. Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017

NO	URAIAN	APBD 2016	KUA-PPAS 2017	SELISIH	%
I	PENDAPATAN	59.004.784.464.142	60.899.636.291.554	1.894.851.827.412	3,21
A	Pendapatan Asli Daerah	39.322.613.624.142	41.460.308.000.554	2.137.694.376.412	5,44
	• Pajak Daerah	32.010.000.000.000	35.230.000.000.000	3.220.000.000.000	10,06
	- PKB	7.050.000.000.000	7.900.000.000.000	850.000.000.000	12,06
	- BBN-KB	4.800.000.000.000	5.000.000.000.000	200.000.000.000	4,17
	- PBB-KB	1.300.000.000.000	1.100.000.000.000	(200.000.000.000)	(15,38)
	- Pajak Hotel	1.600.000.000.000	1.630.000.000.000	30.000.000.000	1,88
	- Pajak Restoran	2.550.000.000.000	2.800.000.000.000	250.000.000.000	9,80
	- Pajak Hiburan	700.000.000.000	750.000.000.000	50.000.000.000	7,14
	- Pajak Reklame	1.150.000.000.000	850.000.000.000	(300.000.000.000)	(26,09)
	- PPJ	760.000.000.000	900.000.000.000	140.000.000.000	18,42
	- Pajak Air Tanah	100.000.000.000	100.000.000.000	-	0,00
	- Pajak Parkir	500.000.000.000	600.000.000.000	100.000.000.000	20,00
	- BPHTB	4.600.000.000.000	5.300.000.000.000	700.000.000.000	15,22
	- PBB	6.400.000.000.000	7.700.000.000.000	1.300.000.000.000	20,31
	- Pajak Rokok	500.000.000.000	600.000.000.000	100.000.000.000	20,00
	• Retribusi Daerah	800.000.000.000	650.000.000.000	(150.000.000.000)	(18,75)
	- Retribusi Jasa Umum	300.350.000.000	103.793.400.000	(196.556.600.000)	(65,44)
	- Retribusi Jasa Usaha	100.000.000.000	136.621.600.000	36.621.600.000	36,62
	- Retribusi Jasa Perizinan Tertentu	399.650.000.000	409.585.000.000	9.935.000.000	2,49
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	790.000.000.000	453.338.246.000	(336.661.754.000)	(42,62)
	• Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.722.613.624.142	5.126.969.754.554	(595.643.869.588)	(10,41)
B.	Dana Perimbangan	13.867.897.878.000	18.664.926.691.000	4.797.028.813.000	34,59
	• Dana Bagi Hasil	13.867.897.878.000	15.020.468.445.000	1.152.570.567.000	8,31

NO	URAIAN	APBD 2016	KUA-PPAS 2017	SELISIH	%
	- Dana Bagi Hasil Pajak	13.819.992.249.000	14.977.325.782.000	1.157.333.533.000	8,37
	~ PBB*	120.501.770.000	100.041.325.000	(20.460.445.000)	(16,98)
	~ PPH	13.699.490.479.000	14.877.284.457.000	1.177.793.978.000	8,60
	- Bagi Hasil Bukan Pajak	47.905.629.000	43.142.663.000	(4.762.966.000)	(9,94)
	• Dana Alokasi Umum	0	0	-	
	• Dana Alokasi Khusus	0	3.644.458.246.000	3.644.458.246.000	

Sumber : BPKAD dan DPP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016

Berdasarkan Tabel IV.2 diatas, komponen Pendapatan Daerah yang memberikan kontribusi terbesar dalam peningkatan pendapatan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.41.460.308.000.554.

4.1.3 Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah

1. Pemberlakuan perubahan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk kendaraan bermotor baru sebesar 15 persen.
2. Perubahan tarif Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, yang sebelumnya 2,4 persen menjadi 6 persen untuk masyarakat pelanggan diatas 3.500 kva.
3. Perubahan tarif Pajak Parkir yang sebelumnya 20 persen menjadi 30 persen.
4. Meningkatkan Tarif Pajak Hiburan terhadap jenis hiburan tertentu sebesar 35 persen untuk jenis hiburan malam dan sejenisnya, sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan paling tinggi 75 persen untuk jenis hiburan tertentu.
5. Melakukan pemungutan pajak daerah dengan peningkatan online sistem wajib pajak bekerjasama dengan bank BRI dengan mengimplementasikan Cash Management System (CMS) terhadap 4 (empat) jenis pajak daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir dan Pajak Hiburan.

6. Melakukan optimalisasi penerimaan pajak reklame dengan pemberlakuan perubahan dasar pengenaan pajak reklame untuk reklame berjalan dan menyesuaikan tarif Kelas Jalan.
7. Menerapkan penyelenggaraan reklame dengan teknologi LED, yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak reklame dan menata ruang kota Jakarta menjadi lebih indah dalam penempatan reklame.
8. Mendorong kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengalihan on-street parking menjadi off-street parking dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Parkir
9. Melaksanakan optimalisasi pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan melakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan BPHTB.
10. Melaksanakan optimalisasi pelaksanaan pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan yang menjadi kewenangan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan melakukan pemutakhiran data objek pajak PBB-P2 serta melakukan penyesuaian NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2.
11. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan membuat kesepakatan perihal pertukaran data informasi terkait informasi perpajakan maupun laporan keuangan Wajib Pajak tertentu.
12. Revisi perijinan hotel dan restoran yang menjalankan aktifitas hiburan untuk diperluas menjadi objek pajak hiburan
13. Meningkatkan kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta dalam hal penagihan piutang pajak daerah.

4.2 Belanja Daerah

Pengalokasian Belanja Daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2017 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan dan mengikuti

ketentuan perundangan yang berlaku. Kebijakan terkait Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2017 yaitu sebagai berikut.

4.2.1 Kebijakan terkait Pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja Wajib (Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006) :

1. Memenuhi Belanja Mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa.
2. Memenuhi Belanja Wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain : Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

4.2.2 Kebijakan terkait Pemenuhan Belanja Prioritas dalam pencapaian visi dan misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 :

1. Melaksanakan Program Unggulan dan Program Prioritas dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017.
2. Melaksanakan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2017 sesuai dengan arah kebijakan pembangunan tahun keempat yang tertuang di dalam RPJMD yaitu memantapkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun keempat diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sector agar terwujud pembangunan kota Jakarta yang berkelanjutan secara fisik, sosial dan ekonomi. Sinergitas kebijakan,

program dan kebijakan antar bidang dilakukan dalam rangka mewujudkan kota Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi.

3. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi. peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan.
4. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian 9 prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2015 - 2019 serta pemenuhan ketentuan perundang-undangan.
5. Melaksanakan pendampingan terhadap program-program pemerintah pusat serta program-program yang didanai oleh Lembaga Keuangan Internasional.
6. Mengakomodir program pembangunan yang dijamin melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang.
7. Mengakomodir Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD. yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD sebagaimana yang diatur pada pasal 96 ayat Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Perencanaan dan Penganggaran Terpadu.
8. Meningkatkan peran Jakarta sebagai Ibukota Negara sebagaimana yang diamanatkan pada arah kebijakan pembangunan RPJMD DKI Jakarta tahun 2013 – 2017.

4.2.3 Kebijakan terkait pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang

4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. dan
6. Sosial

4.2.4 Kebijakan terkait belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga (sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) :

1. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
2. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
3. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah Iainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah Iainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

4. Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

4.2.5 Kebijakan terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik (sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016), yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 dan Lampiran XVIII Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015, DAK Non Fisik terdiri dari:

1. Kebijakan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
2. Kebijakan untuk Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPG PNSD);
3. Kebijakan untuk Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah (Tamsil PNSD);
4. Kebijakan untuk Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2);
5. Kebijakan untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD);
6. Kebijakan untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB); dan
7. Kebijakan untuk Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan (PK2 UKM dan Naker).

4.2.6 Kebijakan terkait mengkomodir laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap Raperda tentang APBD Perubahan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016, antara lain :

1. Rehabilitasi Total Gedung Sekolah;
2. Pembentukan SMK Boarding School;
3. Pengamanan PILKADA/Posko Bersama Pemilihan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017.

4.2.7 Kebijakan terkait adanya Peraturan yang ditetapkan pasca disampaikannya Rancangan KUA PPAS APBD Tahun 2017 kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta, antara lain :

1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 137 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2011 tentang Satuan Biaya Khusus untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 135 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Keputusan Gubernur Nomor 1880/2016 tentang Satuan Biaya Honorarium Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
3. Peraturan Gubernur Prov DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;
4. Keputusan Gubernur Nomor 2331/2016 tentang Penetapan Jumlah Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan;
5. Keputusan Gubernur Nomor 1337/2016 tentang Biaya Kegiatan dan Biaya Pemberian Makanan Tambahan pada Pos Pelayanan Terpadu.

4.2.8 Kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016 yang gagal dilaksanakan sehingga menjadi prioritas pada tahun 2017, antara lain:

1. Rehab Total Kantor Lurah;
2. Pembangunan Rumah Susun;
3. Pembangunan/Rehab Total Puskesmas dan RSUD tipe D.

4. Pembangunan Jalan Layang Non Tol Kapten Tendean – Blok M – Cileduk;
5. Rehabilitasi Berat Gedung Sekolah.

4.2.9 Kebijakan lainnya, antara lain :

1. Adanya MoU antara Dinas Pendidikan dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud;
2. Penyesuaian harga komponen BBM KDO/KDO Khusus.

4.3 Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD, selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga Pembiayaan Daerah, yaitu setiap penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Subbab ini berisikan uraian mengenai kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah.

4.3.1 Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan ditargetkan sebesar Rp.9.389.776.000.000. Sumber Penerimaan Pembiayaan diharapkan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2016 dan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah. Untuk SiLPA Tahun 2016 diperkirakan akan mencapai Rp.5.700.000.000.000, sementara Pinjaman Daerah terhadap proyek MRT sebesar Rp. 3.689.776.000.000.

4.3.2 Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) pada Perusahaan Daerah sebesar Rp.6.572.011.937.752 yang terdiri atas :

1. PMP untuk PT MRT sebesar Rp.4.673.080.000.000;
2. PMP untuk PT Jakarta Propertindo sebesar Rp.1.200.000.000.000;
3. PMP untuk PT Transportasi Jakarta sebesar Rp.420.000.000.000;
4. PMP untuk PT Pasar Jaya sebesar Rp.200.000.000.000;

5. PMP untuk PT PAM Jaya sebesar Rp.300.000.000.000.

4.4 Ringkasan RAPBD 2017

Berdasarkan kebijakan dan target Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, maka secara ringkas dapat disampaikan Ringkasan Struktur RAPBD 2017 pada Penyempurnaan dan Penyesuaian KUA PPAS Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 tercantum pada tabel berikut :

Tabel IV.3. Ringkasan Struktur RAPBD 2017

NO	URAIAN	APBD 2016	KUA-PPAS 2017	SELISIH	%
I	PENDAPATAN	59.004.784.464.142	60.899.636.291.554	1.894.851.827.412	3,21
A	Pendapatan Asli Daerah	39.322.613.624.142	41.460.308.000.554	2.137.694.376.412	5,44
	• Pajak Daerah	32.010.000.000.000	35.230.000.000.000	3.220.000.000.000	10,06
	- PKB	7.050.000.000.000	7.900.000.000.000	850.000.000.000	12,06
	- BBN-KB	4.800.000.000.000	5.000.000.000.000	200.000.000.000	4,17
	- PBB-KB	1.300.000.000.000	1.100.000.000.000	(200.000.000.000)	(15,38)
	- Pajak Hotel	1.600.000.000.000	1.630.000.000.000	30.000.000.000	1,88
	- Pajak Restoran	2.550.000.000.000	2.800.000.000.000	250.000.000.000	9,80
	- Pajak Hiburan	700.000.000.000	750.000.000.000	50.000.000.000	7,14
	- Pajak Reklame	1.150.000.000.000	850.000.000.000	(300.000.000.000)	(26,09)
	- PPJ	760.000.000.000	900.000.000.000	140.000.000.000	18,42
	- Pajak Air Tanah	100.000.000.000	100.000.000.000	-	0,00
	- Pajak Parkir	500.000.000.000	600.000.000.000	100.000.000.000	20,00
	- BPHTB	4.600.000.000.000	5.300.000.000.000	700.000.000.000	15,22
	- PBB	6.400.000.000.000	7.700.000.000.000	1.300.000.000.000	20,31
	- Pajak Rokok	500.000.000.000	600.000.000.000	100.000.000.000	20,00
	• Retribusi Daerah	800.000.000.000	650.000.000.000	(150.000.000.000)	(18,75)
	- Retribusi Jasa Umum	300.350.000.000	103.793.400.000	(196.556.600.000)	(65,44)
	- Retribusi Jasa Usaha	100.000.000.000	136.621.600.000	36.621.600.000	36,62
	- Retribusi Jasa Perizinan Tertentu	399.650.000.000	409.585.000.000	9.935.000.000	2,49
	• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	790.000.000.000	453.338.246.000	(336.661.754.000)	(42,62)
	• Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.722.613.624.142	5.126.969.754.554	(595.643.869.588)	(10,41)
B.	Dana Perimbangan	13.867.897.878.000	18.664.926.691.000	4.797.028.813.000	34,59
	• Dana Bagi Hasil	13.867.897.878.000	15.020.468.445.000	1.152.570.567.000	8,31
	- Dana Bagi Hasil Pajak	13.819.992.249.000	14.977.325.782.000	1.157.333.533.000	8,37
	- ~ PBB*	120.501.770.000	100.041.325.000	(20.460.445.000)	(16,98)
	- ~ PPH	13.699.490.479.000	14.877.284.457.000	1.177.793.978.000	8,60
	- Bagi Hasil Bukan Pajak	47.905.629.000	43.142.663.000	(4.762.966.000)	(9,94)

NO	URAIAN	APBD 2016	KUA-PPAS 2017	SELISIH	%
	• Dana Alokasi Umum	0	0	-	
	• Dana Alokasi Khusus	0	3.644.458.246.000	3.644.458.246.000	
C.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.814.272.962.000	774.401.600.000	(5.039.871.362.000)	(86,68)
	• Pendapatan Hibah	2.244.419.882.000	774.401.600.000	(1.470.018.282.000)	(65,50)
	Bantuan Dana (Dana - Penyesuaian dan Otonomi Khusus)	0	0	-	
	- Hibah untuk MRT	2.233.619.000.000	763.304.000.000	(1.470.315.000.000)	(65,83)
	- Hibah untuk Jasa Raharja	10.800.882.000	11.097.600.000	296.718.000	2,75
	• Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	3.569.853.080.000	-	(3.569.853.080.000)	(100,00)
	Transfer utk Guru - Sertifikasi & Non Sertifikasi	2.001.642.280.000	0	(2.001.642.280.000)	(100,00)
	- Dana BOS	1.568.210.800.000	0	(1.568.210.800.000)	(100,00)
II	BELANJA	59.945.522.786.232	63.479.133.393.596	3.533.610.607.364	5,89
A.	Belanja Tidak Langsung	25.562.945.425.753	28.126.857.477.505	2.563.912.051.752	10,03
	Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan DPRD, PNS, CPNS)	18.715.193.047.771	20.347.770.123.750	1.632.577.075.979	8,72
	Gaji dan Tunjangan - Pimpinan dan Anggota DPRD	59.492.166.000	100.210.320.750	40.718.154.750	68,44
	Belanja Penunjang - Operasional Pimpinan DPRD	676.800.000	676.800.000	0	0,00
	Gaji dan Tunjangan - Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	299.816.000	275.644.000	(24.172.000)	(8,06)
	- Gaji dan Tunjangan PNS dan CPNS	6.022.696.783.771	6.282.412.351.000	259.715.567.229	4,31
	- Asuransi Kesehatan (BPJS)	105.903.469.000	105.903.469.000	0	0,00
	- TKD PNS dan CPNS	9.360.818.371.000	11.047.924.349.000	1.687.105.978.000	18,02
	Biaya Penunjang - Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	54.385.362.000	54.385.362.000	-	0,00
	Belanja Insentif - Pemungutan Pajak Daerah	652.000.000.000	351.444.613.000	(300.555.387.000)	(46,10)
	- Biaya Kematian Pensiunan PNS	27.829.500.000	27.829.500.000	-	0,00

NO	URAIAN	APBD 2016	KUA-PPAS 2017	SELISIH	%
	luran Jaminan - Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	16.215.000.000	16.267.935.000	52.935.000	0,33
	- Tunjangan Penghargaan PNS	6.723.000.000	13.223.000.000	6.500.000.000	96,68
	Tunjangan Transport - Pejabat (Pengganti KDO Pejabat)	368.074.500.000	307.138.500.000	(60.936.000.000)	(16,56)
	- Biaya Guru NIP 15	38.436.000.000	38.436.000.000	-	0,00
	Tambahan - Penghasilan Guru PNS Non Sertifikasi	3.915.000.000	3.915.000.000	-	0,00
	Tambahan - Penghasilan Guru PNS Sertifikasi	1.997.727.280.000	1.997.727.280.000	-	0,00
	● Belanja Bunga	30.000.000.000	49.226.437.819	19.226.437.819	64,09
	● Belanja Subsidi	1.612.726.275.800	3.234.116.847.884	1.621.390.572.084	100,54
	● Belanja Hibah	2.550.498.855.395	1.298.502.156.929	(1.251.996.698.466)	(49,09)
	● Belanja Bantuan Sosial	2.524.193.425.000	2.500.613.722.000	(23.579.703.000)	(0,93)
	● Belanja Bantuan Keuangan	1.818.003.960	348.804.149.960	346.986.146.000	19086,11
	● Belanja Tidak Terduga	128.515.817.827	347.824.039.163	219.308.221.336	170,65
B.	Belanja Langsung	34.382.577.360.479	35.352.275.916.091	969.698.555.612	2,82
	● Belanja Pegawai	1.575.091.993.662	1.968.048.276.447	392.956.282.785	24,95
	● Belanja Barang dan Jasa	16.624.523.868.403	17.925.066.939.566	1.300.543.071.163	7,82
	● Belanja Modal	16.182.961.498.414	15.459.160.700.078	(723.800.798.336)	(4,47)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(940.738.322.090)	(2.579.497.102.042)	(1.638.758.779.952)	174,20
III	PEMBIAYAAN	940.738.322.090	2.579.497.102.042	1.638.758.779.952	174,20
A.	Penerimaan	8.163.357.322.090	9.389.776.000.000	1.226.418.677.910	15,02
	● SILPA	7.933.425.813.490	5.700.000.000.000	(2.233.425.813.490)	(28,15)
	● Pinjaman JEDI	229.931.508.600	0	(229.931.508.600)	(100,00)
	● Pinjaman MRT : ● Pinjaman Daerah	0	3.689.776.000.000	3.689.776.000.000	
B.	Pengeluaran	7.222.619.000.000	6.810.278.897.958	(412.340.102.042)	(5,71)
	● Penyertaan Modal Pemerintah	7.222.619.000.000	6.793.080.000.000	(429.539.000.000)	(5,95)
	- PT. MRT Jakarta	2.282.619.000.000	4.673.080.000.000	2.390.461.000.000	104,72
	- PT. Jakarta Propertindo	2.950.000.000.000	1.200.000.000.000	(1.750.000.000.000)	(59,32)
	- PT. Transportasi Jakarta	750.000.000.000	420.000.000.000	(330.000.000.000)	(44,00)
	- PD. Pasar Jaya	370.000.000.000	200.000.000.000	(170.000.000.000)	(45,95)
	- PT. PAM Jaya	0	300.000.000.000	300.000.000.000	

NO	URAIAN	APBD 2016	KUA-PPAS 2017	SELISIH	%
	• Pembayaran Utang Pokok	0	17.198.897.958	17.198.897.958	
	TOTAL APBD	67.168.141.786.232	70.289.412.291.554	3.121.270.505.322	4,65

Sumber : Bappeda dan BPKAD Provinsi DKI Jakarta, 2016

Sesuai dengan Tabel IV.3 di atas, besaran total RAPBD Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.70.289.412.291.554, yang terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp.60.899.636.291.554, Belanja Daerah sebesar Rp.63.479.133.393.596, Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.9.389.776.000.000 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.6.810.278.897.958.

BAB V

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 yang telah disusun dan dibahas bersama antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi DKI Jakarta. Pembahasan bersama tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Perencanaan dan Penganggaran Terpadu serta peraturan perundangan yang berlaku.

Substansi KUA Tahun Anggaran 2017 disusun berdasar pada Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga hasil reses anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta serta kebijakan nasional.

Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan masyarakat Jakarta dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Jika dalam proses pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2017 menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2017 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUA ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta.